

BAB IV

KONDISI SOSIAL-POLITIK INDONESIA PADA TAHUN 1973-1997 DALAM NOVEL WASRIPIN DAN SATINAH KARYA KUNTOWIJOYO

4.1 Kondisi Sosial-Politik Indonesia Tahun 1966-1972

4.1.1 Berdirinya Orde Baru

Orde Baru merupakan periode sejarah Indonesia yang merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1966-1998. Berdirinya periode Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari peristiwa G30S (Gerakan 30 September) pada akhir tahun 1965 yang mendorong kekacauan politik, sosial, dan inflasi ekonomi yang tajam. Peristiwa tersebut mendorong berbagai kalangan masyarakat baik mahasiswa, pemuda, wanita, pelajar, maupun organisasi massa untuk membentuk kesatuan aksi dan menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di Indonesia. Berbagai kesatuan aksi yang memprotes peristiwa G30S bergabung dalam Front Pancasila atau dikenal juga sebagai Angkatan 66 yang mengadakan demonstrasi menuntut Tritura. Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) adalah pernyataan terbuka dari masyarakat yang ditujukan kepada pihak pemerintahan Orde Lama (pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1945-1966) dengan isi tuntutan berupa (1) pembubaran PKI; (2) Retool Kabinet Dwikora; (3) Turunkan harga dan perbaiki ekonomi; yang digaungkan oleh masyarakat lewat aksi-aksi yang digalang oleh mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm.543-545).

Upaya Presiden Soekarno untuk menyelesaikan permasalahan G30S dan menyelamatkan ekonomi adalah dengan membentuk panitia yang bertugas untuk menyelidiki kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dan panitia yang bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta mengenai dampak dari peristiwa G30S (Gerakan 30 September). Hasil dari upaya kedua panitia tersebut diperoleh kesimpulan bahwa inflasi menunjukkan laju yang begitu deras dan adanya keinginan dari rakyat agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan politik yang ada. Namun keputusan Presiden Soekarno untuk menunda

penyelesaian permasalahan politik mendorong mahasiswa meminta pemerintah untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil sayangnya permintaan tersebut tidak mendapat respon positif dari pemerintah. Sikap pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dirasa tidak mencerminkan keinginan rakyat sehingga masyarakat melalui mahasiswa dan para pelajar menyuarakan ketidakpuasannya dalam bentuk demonstrasi dengan poin utama berupa Tritura.

Presiden Soekarno menggelar pertemuan dengan perwakilan dari mahasiswa namun dalam pertemuan tersebut Presiden Soekarno menilai aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan aksi yang didalangi oleh pihak-pihak asing sehingga Presiden Soekarno mendorong pembentukan kelompok “Barisan Soekarno” sebagai upaya untuk bertahan dipemerintahan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm.545). Sebagai tokoh proklamator dan salah satu pendiri bangsa, Presiden Soekarno tetap memiliki karisma untuk mempertahankan kepercayaan rakyat. Hal ini terlihat dari dukungan masyarakat untuk “Barisan Soekarno” yang dibentuknya. Namun disisi lain ABRI sebagai salah satu pendukung terhadap pemerintahan Presiden Soekarno memiliki opini yang berbeda dalam memandang pembentukan “Barisan Soekarno” hal ini bisa dilihat dari pelarangan pembentukan “Barisan Soekarno” dalam bentuk organisasi di daerah hukum Jawa Barat dan Sumatra. Pernyataan tersebut diikuti oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang merupakan pelopor aksi-aksi dalam upaya menyampaikan Tritura. Kondisi semakin memanas setelah Presiden Soekarno melakukan *reshuffle* kabinet yang menyingkirkan tokoh-tokoh vokal yang menyuarakan isu G30S sehingga mendorong aksi demonstrasi pada pelantikan menteri kabinet yang baru dibentuk tersebut. Buntut dari aksi tersebut hadir keputusan pembubaran KAMI dari Panglima Besar Komando Ganyang Malaysia (Erlina, 2020, hlm.96).

Setelah serangkaian peristiwa tersebut Presiden Soekarno masih mencoba untuk terus mempertahankan pemerintahannya meski masyarakat melalui mahasiswa dan Front Pancasila merasa tidak puas dengan keputusan-keputusan yang telah diambil. Hal ini dapat dilihat dari upaya Presiden Soekarno untuk meredam krisis politik yang semakin memuncak dengan mengundang Front Pancasila, ASu-PNI, dan Partindo dalam sebuah pertemuan pada tanggal 10

Maret 1966 yang hasilnya tidak dapat memuaskan kedua belah pihak (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm.548). Pada tanggal 11 Maret 1966 kabinet mengadakan sidang paripurna dengan agenda utama yakni penyelesaian krisis yang semakin memuncak. Pada proses sidang terjadi pemboikotan oleh para demonstran dengan aksi pengempisan ban-ban pada kendaraan di jalan-jalan menuju istana serta adanya pasukan tanpa tanda pengenal di tengah-tengah demonstran sehingga Presiden Soekarno merasa terancam dan memutuskan untuk meninggalkan sidang dan menuju ke Bogor dengan pengawalan yang ketat. Kepergian Presiden Soekarno ke Bogor kemudian diikuti oleh tiga orang perwira tinggi TNI AD yakni Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud atas ijin dari Menteri/Panglima Angkatan Darat sekaligus Panglima Komkamtib Jenderal Soeharto (Wardaya, 2009, hlm.119-120).

Di istana Bogor Presiden Soekarno dan ketiga perwira tinggi tersebut terlibat pembicaraan yang mendorong hadirnya surat perintah untuk Jenderal Soeharto. Surat perintah tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang berisi perintah Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dirasa dapat menyelesaikan segala permasalahan yang tengah terjadi atas nama presiden. Pemilihan Soeharto sebagai pengemban amanat merujuk pada jabatan yang dimilikinya. Soeharto sendiri merupakan tentara yang bergabung bersama KNIL selama penjajahan Belanda dan berhasil ditempatkan di Batalion XIII di Rampal pada awal karirnya (Yogaswara, 2012, hlm.28). Karir militer Soeharto berjalan dengan mulus baik selama bergabung dengan KNIL, maupun PETA, kemudian menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat sekaligus Panglima Komkamtib. Sesuai perintah yang diberikan kepadanya, Jenderal Soeharto memanggil Front Pancasila dan para panglima daerah ke Markas Kostrad untuk membicarakan perihal surat perintah yang diberikan kepadanya (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm.). Langkah pertama yang diambil oleh Jenderal Soeharto adalah pelarangan dan pembubaran PKI serta seluruh organisasi massa yang bernaung dan memiliki asas yang sama dengan PKI serta menghimbau seluruh mahasiswa dan pelajar untuk kembali menjalankan aktivitas di tempatnya

masing-masing. Langkah ini diambil karena pada saat itu hadir keyakinan bahwa PKI merupakan dalang utama dari peristiwa G30S.

Langkah kedua yang diambil yakni dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dan tidak memudahkan proses penyelesaian masalah G30S yakni dr. Subandrio, dr. Chaerul Saleh, Ir. Surachman, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Oei Tjoe Tat, S.H., Jusuf Muda Dalam, Mayjen Achmadi, drs. Achadi, Sumardjo, Armunanto, Soetomo Martopradopo, Astrawinata, S.H., J. Tumakaka, Mayjen dr. Sumarno, dan Letkol Sjafei. Ricklef (2007, hlm. 569) mengemukakan bahwa sekitar 2.600 tentara Divisi Diponegoro diberhentikan, diskors, dibebastugaskan, dan ditahan dengan tuduhan terlibat dalam permasalahan G30S. Selain melakukan penertiban Soeharto sebagai pimpinan pelaksanaan pemerintahan juga mengangkat 5 Menteri Koordinator *ad interim* merangkap Presidium Kabinet yakni Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, dr. Roeslan Abdulgani, dr. K. H. Idham Chalid, dan dr. J. Leimena serta beberapa menteri *ad interim* lain yang diangkat sampai terbentuknya kabinet yang baru (Ricklefs, 2007, hlm.569).

Dengan diembannya tugas pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan instruksi dalam Surat Perintah Sebelas Maret pada kurun waktu 1966-1967 Indonesia berada di dalam dualisme kepemimpinan dimana Presiden Soekarno sebagai presiden aktif dan Jenderal Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Kondisi tersebut mendatangkan saran-saran dari berbagai kalangan seperti organisasi-organisasi mahasiswa yang melihat bahwa telah terjadi berbagai penyimpangan terhadap Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara sehingga perbaikan politik serta pemurnian terhadap pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan hal yang harus segera dilakukan. Sumbangan pikiran tersebut kemudian diangkat menjadi salah satu bahasan pada Sidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 20 Juni-5 Juli 1966. Dari sidang tersebut menghasilkan 24 ketetapan dan keputusan No, 5/MPRS/1966 serta Ketetapan MRPS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera.

Dalam prosesnya sidang tersebut diwarnai dengan aksi dari para pendukung Presiden Soekarno yang melakukan konsolidasi dan pawai namun

hal tersebut tidak menghentikan proses persidangan yang ada. Pembentukan kabinet sendiri diserahkan kepada Jenderal Soeharto dengan tugas pokok untuk memenuhi dan melaksanakan Tritura serta menciptakan kestabilan politik dan ekonomi dengan menciptakan program-program yang mendorong perbaikan kehidupan rakyat dalam bidang sandang dan pangan serta melaksanakan pemilihan umum sesegera mungkin. Perubahan lain yang dilakukan adalah mulai diberlakukannya desentralisasi kekuasaan yakni pemberian otonomi pada pemerintahan daerah tanpa mengurangi wewenang dan tugas pemerintah pusat, penerapan sistem pendidikan Pancasila, serta pengoptimalan penggunaan Bahasa Indonesia. Suasana politik yang sempat memanas pada proses persidangan MPRS sebelumnya berangsur-angsur mereda setelah Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya meski tidak secara penuh pada Jenderal Soeharto sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 tahun 1967 (Prattama, 2019). Sehingga pada Sidang MPRS tanggal 7 Maret 1967 Jenderal Soeharto resmi menjadi pejabat presiden.

Dalam kurun waktu tersebut Soeharto selaku pejabat presiden dan perangkat pemerintah yang dibentuknya berupaya untuk memenuhi setiap tuntutan dalam Tritura. Program-program yang dibuat diutamakan untuk pada perbaikan ekonomi dengan membuka peluang untuk pihak asing untuk menanamkan modal di Indonesia serta mengeluarkan kebijakan yang berpusat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Pribadi, 2010). Hal ini dilakukan dengan stabilisasi atau pengendalian inflasi yang bertujuan untuk menahan harga-harga bahan pokok agar tidak semakin melonjak naik dan rehabilitasi ekonomi dengan memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana produksi yang ada. Beberapa perubahan juga dilakukan dalam bidang ekonomi seperti perubahan landasan ekonomi yang semula ekonomi terpimpin menjadi demokrasi ekonomi serta pembaruan kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan. Dapat dikatakan bahwa pada periode tersebut penyelamatan terhadap ekonomi negara dapat diraih dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari laju inflasi yang dapat ditekan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 serta mulai meningkatnya produksi sandang pada tahun 1968.

Hutang-hutang Indonesia pada periode Demokrasi terpimpin yang mencapai US \$ 2,2-2,7 miliar dengan tenggat waktu pembayaran tahun 1967 mendorong Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan sebagai penerus bersama pemerintahan di bawah Jenderal Soeharto mencoba untuk meminta kepada negara-negara kreditor untuk memberi keringanan dengan menunda pembayaran hutang yang mendapat hasil yang positif berupa kesepakatan bahwa Indonesia diberikan keringanan yang diminta (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm.572). Selain itu pemerintah juga mampu mengusahakan bantuan luar negeri dengan melakukan berbagai pertemuan untuk membantu memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang tengah terpuruk. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut adalah mengembalikan fungsi Kepolisian Republik Indonesia pada fungsinya yang semula sehingga tingkat kriminalitas yang terjadi berangsur-angsur menurun. Kondisi Indonesia yang carut marut lambat laun mengalami kemajuan kearah yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan.

Dalam urusan politik luar negeri, Pemerintah Orde Baru berupaya untuk memulihkan hubungan Indonesia dengan negara-negara luar. Salah satunya adalah hadirnya keputusan untuk mengembalikan keikutsertaan Indonesia dalam PBB dan perbaikan hubungan antara Indonesia-Malaysia (Permana, 2018, hlm.9). Setelah itu Indonesia juga menggelar berbagai pertemuan yang menghasilkan terciptanya persatuan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara yang dinamai ASEAN. Organisasi tersebut dibentuk untuk mewedahi kerja sama antara negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang baik ekonomi maupun budaya. Kondisi tersebut dipilih dengan harapan negara-negara luar yang memiliki banyak modal mampu membantu dalam urusan pembangunan negara. Upaya-upaya tersebut juga dipilih guna memulihkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.

Perkembangan-perkembangan yang terjadi serta mulai stabilnya perpolitikan Indonesia yang ada rupanya belum memungkinkan untuk pemerintah memenuhi salah satu amanat MPRS yakni terlaksananya pemilihan umum guna membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab penuh secara resmi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi

dikarenakan berbagai faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain dengan faktor utama adalah belum terciptanya undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum hingga tahun 1968 dimana tahun tersebut merupakan tenggat waktu yang diberikan MPRS sebagai tahun pelaksanaan pemilu. Pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses pembuatan undang-undang rupanya belum mampu menciptakan undang-undang yang sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang diberlakukan secara murni dan konsekuen (Sulastomo, 2008, hlm.191). Kondisi Indonesia yang masih belum benar-benar stabil menjadi faktor lain yang membuat undang-undang yang diharapkan segera terbentuk belum mampu dirampungkan. Oleh karena itu sesuai dengan Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968 diputuskan bahwa secara resmi mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua pada tanggal 27 Maret 1968 (Hanazaki, 1998, hlm.55).

Program yang diusung oleh pemerintahan Presiden Soeharto tercantum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita I mulai dilaksanakan pada 1 April 1969 dan berakhir pada 31 Maret 1974. Pada program ini pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan meletakkan dasar-dasar pembangunan untuk tahap-tahap pada pembangunan berikutnya. Dasar-dasar pembangunan tersebut bertumpu pada Trilogi Pembangunan berupa (1) Pemerataan pembangunan yang hasilnya mendorong keadilan sosial bagi masyarakat; (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; (3) stabilitas nasional yang dinamis dan sehat (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm.5740). Pemerintah mencoba meningkatkan perekonomian Indonesia dengan membangun bidang pertanian. Kondisi tersebut dipilih sebab menyesuaikan dengan masyarakat yang pada saat itu masih bertumpu pada pertanian. Dengan berkembang dan meningkatnya penghasilan negara melalui eksplorasi pada sektor pertanian diharapkan dapat menunjang ketersediaan pangan, sandang, dan papan masyarakat. Sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera baik dalam aspek pangan, sandang maupun aspek rohani.

Menurut Rajab (2004, hlm.191) Pemerintah Orde Baru membagi kekuasaan menjadi tiga ranah kekuatan politik yakni Presiden, Angkatan

Bersenjata, dan Birokrasi. Pertama, presiden sebagai pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan pengontrol dalam segala aspek yang berhubungan dengan rekrutmen politik dalam setiap lembaga. Kedua, kekuatan Angkatan Bersenjata sebagai pengawal, stabilitator, dan pengaman pelaksanaan segala program dan keputusan lembaga kepresidenan. Ketiga, birokrasi sebagai pelaksana segala program dan keputusan pihak kepresidenan. Ketiganya berkolaborasi untuk terus memperkokoh posisinya dalam pemerintahan yang tengah berlangsung. Pemerintahan pada periode tersebut dijalankan dengan gaya paternalistik dimana terjadi pembatasan dalam kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan diri yang diterapkan secara keras dan terkesan menindas (Ricklefs, 2007, hlm.559). Hal tersebut mendorong kekuasaan yang dimiliki presiden sangat besar dan banyak terjadi kekerasan yang mengatasnamakan upaya menjaga kestabilan negara. Doktrin Kekarya ABRI yang ada sejak pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pada periode Orde Baru mendapat wadah yang lebih besar dimana jumlah prajurit yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan semakin bertambah setiap pemilu diadakan.

Pemerintah Orde Baru terus mencoba berkolaborasi dengan pihak-pihak yang dirasa akan memberi kelancaran terhadap kelangsungan pemerintahan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah lambat laun dapat kembali berkenaan dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi dan sosial yang ada. Mahasiswa sebagai ujung tombak perubahan mendukung perkembangan Orde Baru sebab merasa perubahan yang diharapkan akhirnya terjadi. Selain itu pemerintah membuat suatu wadah guna menampung aspirasi mahasiswa yakni ABRI menyponsori Surat Kabar seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha (Sk, dkk, 2001, hlm.6). Simpati rakyat bukan hanya mampu didapatkan oleh pemerintah namun ABRI sebagai salah satu tumpuan pemerintah dalam mempertahankan kestabilan negara pun mampu bersinergi dengan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa upaya konsolidasi politik Orde Baru pada awal perkembangan pemerintahan tersebut berhasil dilakukan dengan baik.

4.1.2 Pemilihan Umum Tahun 1971

Salah satu amanat MPRS yakni pelaksanaan pemilu sesegara mungkin yang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, akhirnya terlaksana pada tahun 1971. Perangkat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilu seperti undang-undang maupun seluruh kebutuhan untuk proses pelaksanaan pemilu sudah dapat dipersiapkan. Seperti yang kita tahu bahwa pemilihan umum pada periode Orde Baru mengalami keterlambatan hingga kurang lebih empat tahun dari waktu yang semula ditetapkan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah fokus pemerintah kepada perbaikan ekonomi dan penyelamatan negara. Selain itu kestabilan negara juga menjadi faktor lain yang mendorong tidak siapnya Undang-undang dan perangkat pemilu. Setelah dirasa kondisi Indonesia lebih stabil dan pemerintah akhirnya menyelesaikan landasan untuk pemilihan umum berupa UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Suwirta, Mail, dan Tengah, 2021, hlm.31). Pemilu sendiri merupakan sarana demokrasi yang digunakan sebagai wadah untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pergerakan kekuasaan bangsa sehingga dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dipercaya mampu untuk mengemban tugas pemerintahan dan memimpin negara (Ranadireksa, 2002, hlm.).

Pemilu tahun 1971 digelar dengan tujuan untuk kembali menciptakan dan menumbuhkan demokrasi di dalam kehidupan perpolitikan Indonesia. Diikuti oleh Partai Katolik, Partai Syarekat Islam, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam Perti, Partai Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia dan Golkar. Seperti pada pemilihan umum lainnya, pemerintah memberikan waktu untuk partai-partai yang ada untuk melakukan kampanye. Kampanye merupakan sarana untuk partai politik dapat mengkomunikasikan pandangan, pendapat, dan aspirasi rakyat yang telah dirangkum dan dipadukan dengan kepentingan partai sehingga dapat menarik simpati dari masyarakat. Dalam kampanye Pemilu 1971 partai politik menggunakan berbagai strategi seperti memanfaatkan kesenian baik tradisional maupun seni hiburan yang tengah digandrungi masyarakat. Selain kampanye untuk menarik simpati masyarakat, para peserta pemilu juga

mengkomunikasikan isu politik dengan berbagai fokusnya masing-masing. Sebagai contoh adalah Golkar sebagai pemenang pemilu yang pemanfaatan musik sebagai sarana pemilu serta mengangkat pembangunan sebagai isu politik (Pratiwi, Sinaga, dan M, 2020, hlm.93).

Golkar sendiri semula bukan organisasi yang bergerak dibidang politik karena dibentuk untuk menandingi perkembangan pesat PKI. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya kekhawatiran dari perwira Angkatan Darat atas perkembangan PKI yang akan mengancam kestabilan negara. Embrio Golkar sendiri datang dari sebuah panitia yang terdiri dari anggota Gerakan Militer Pelajar, cendekiawan, dan militer yang mempersiapkan penyusunan “Piagam Pernyataan Karyawan” sebagai bentuk respon dari peraturan Presiden Soekarno mengenai syarat organisasi Front Nasional (Pratigny, 1984, hlm.91). Panitia penyusunan piagam tersebut mengundang 35 organisasi non-afiliasi melalui wakil-wakilnya bersama-sama menandatangani piagam tersebut.

Menurut Dinata (1992, hlm.15) pada tanggal 20 Oktober 1964 panitia pelaksanaan Sekber Golkar terbentuk dengan diketuai oleh Kolonel Djuhartono, Imam Pratigny (NU), J. K. Tumakaka (PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam) sebagai wakil ketua. Kemudian Dr. Amino Gundoutomo sebagai sekretaris jenderal, serta Sutomo Gondowongso sebagai wakil sekretaris jenderal. Dan secara resmi Sekertariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar resmi berdiri. Organisasi tersebut menghimpun berbagai organisasi massa baik organisasi pemuda, wanita, buruh, tani, pelajar, maupun nelayan. Kelahiran Sekber Golkar sendiri erat kaitannya dengan pesatnya perkembangan PKI dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi kalangan militer. Sekber Golkar merupakan sebuah golongan karya atau golongan fungsional yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu.

Hadirnya Sekber Golkar sendiri berasal dari ide Jenderal A. H. Nasution dan rekan-rekan tentara untuk membentuk sebuah federasi yang bertujuan untuk mengimbangi PKI. Dengan anggota Gerakan Tentara Pelajar, cendekiawan, dan tentara sebagai anggota. Dalam praktiknya Sekber Golkar dijalankan oleh ABRI dan tiga organisasi massa yang disponsori oleh ABRI yakni Sentra Organisasi

Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), Koperasi Simpan Tabung Gotong Royong (Kosgoro), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) (Dinata, 1992, hlm.14-16). Perubahan haluan Sekber Golkar yang semula hanya sebuah organisasi menjadi pelaku politik terjadi setelah berdirinya Orde Baru dengan ikut serta pada Pemilu 1971 dengan identitas sebagai Golongan Karya dan berlambang Pohon Beringin. Pada struktur komposisi Golkar pun mengalami perubahan dimana dibentuk Dewan Pimpinan yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I, dan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II sebagai eksekutif.

Berbeda dengan pemilihan umum tahun 1955, pada pemilihan umum tahun 1971 pemerintah menerapkan peraturan yang mengatur para pejabat negara untuk bersikap netral. Pada Pemilu 1955 para pejabat negara baik pejabat pemerintah biasa maupun perdana menteri dapat menjadi calon dari partai tersebut secara formal. Sedangkan pada Pemilu 1971 pejabat pemerintah tidak diperkenankan untuk menunjukkan keberpihakannya kepada partai mana pun. Perubahan lain yang ditemukan pada Pemilu 1971 adalah hal yang berkaitan dengan pembagian kursi. Perubahan tersebut didasarkan pada UU No.15 Tahun 1969 dimana semua kursi dibagi habis di setiap daerah pemilihan yang mendorong pengurangan jumlah partai yang meraih kursi dalam pemerintahan jika dibandingkan dengan penggunaan sistem pada Pemilu 1955. Sederhananya dalam pemilu 1971 menggunakan sistem pemilihan tidak langsung dimana suara masyarakat digunakan untuk memilih partai yang kemudian akan menentukan anggotanya dalam dewan perwakilan. Untuk suara yang diperoleh partai dari setiap daerah sendiri tidak dapat dijumlahkan dan menjadi akumulasi suara yang diperoleh partai (Suwirta, 2019, hlm.32).

Pemilu 1971 memperebutkan 460 kursi, 360 kursi untuk umum dan 100 kursi untuk militer tanpa pemilihan karena militer tidak diperkenankan untuk memilih guna menghindari perpecahan (Miaz, 2012, hlm.93). Pemilu 1971 dimenangkan oleh Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan suara 62,8% suara dan 236 kursi, lalu disusul oleh Nahdlatul Ulama yang memperoleh 18,7% suara dan 58 kursi, dan Parsumi memperoleh 5,4% suara dan 24 kursi. Kemudian secara berturut-turut PNI memperoleh 6,9% suara dan 24 kursi, PSII

memperoleh 2,4% suara dan 10 kursi, Parkindo memperoleh 1,3% suara dan 7 kursi, Partai Katolik memperoleh 1,2% suara dan 3 kursi, Perti memperoleh 0,7% suara dan 2 kursi, IPKI memperoleh 0,6% suara serta Murba memperoleh 0,1% suara tanpa perolehan kursi sama sekali. Golkar memperoleh mayoritas suara hampir di setiap provinsi kecuali Aceh, Jakarta, dan Maluku (Rickelf, 2007, hlm.585). Presiden sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin negara sendiri dipilih oleh MPR oleh karena itu Soeharto berhasil kembali menjabat sebagai presiden sebab Golkar sebagai pemenang mayoritas kursi di DPR dan MPR mengusung Soeharto sebagai presiden.

Golkar yang masih terbilang baru dalam dunia perpolitikan Indonesia mampu menjadi peserta pemilu dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu 1971. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh proses kampanye yang mempromosikan Golkar hingga ke kelompok masyarakat di pedesaan, isu politik yang diangkat Golkar juga mampu menjadi pertimbangan lain. Pembangunan dan modernisasi Indonesia menjadi isu politik yang dipilih oleh pihak Golkar untuk menarik simpati masyarakat. Kedua isu tersebut dipilih sebab keduanya bukan hal yang abstrak berupa konsep yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam namun hal yang dapat dirasakan dan dilihat. Kondisi tersebut merujuk pada proses perbaikan dan pembangunan Indonesia yang tengah dan sedang dilakukan pemerintah Orde Baru yang dinaungi oleh Golkar. Selain itu modernisasi Indonesia dianggap sebagai konsep baru oleh masyarakat sehingga menarik perhatian masyarakat.

Faktor lain yang memuluskan kemenangan Golkar adalah diberlakukannya aturan-aturan yang memberi banyak kebebasan bagi Golkar sebagai peserta pemilu non-partai. Hal ini dapat dilihat dari aturan yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil untuk tidak memihak kepada partai mana pun dan memberikan suaranya untuk Golkar (Puspita, 2012, hlm.32). Golkar juga mendapat dukungan penuh dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang semakin menambah kokoh posisi Golkar dalam perpolitikan Indonesia. Meski begitu peserta lain pun memiliki basis pendukungnya masing-masing. Sebagai contoh Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang masih memiliki banyak simpatisan dari pedesaan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan

sedangkan masyarakat islam perkotaan merupakan basis kekuatan dari Parmusi. Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 menjadi awal dari pemanfaatan Golkar sebagai alat legitimasi kekuasaan pemerintah Orde Baru.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah Orde Baru guna memenangkan Pemilu 1971 adalah dengan melakukan intervensi secara halus pada partai peserta pemilihan umum. Upaya tersebut dilakukan oleh Operasi Khusus Ali Moertopo dimana ia dan kelompok yang dibentuknya mencoba menjalin kerjasama dengan partai-partai yang ada agar tidak ada upaya menentang peran utama Angkatan Darat. Langkah yang diambil berupa pemberian dana bagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang digelar Nahdlatul Ulama (Yulianto, 2002, hlm.276). Tidak hanya NU, operasi serupa juga dilakukan kepada Parmusi dan IPKI. Sehingga didapatkan partai baik secara keseluruhan maupun hanya pemimpin partai tersebut yang pro terhadap pemerintah. Kemudian Moertopo juga bertanggung jawab untuk mengorganisasikan kampanye Golkar sebagai representasi pembangunan masyarakat yang tidak memihak pada suatu ideologi tertentu. Seperti telah dibicarakan bahwa kampanye Golkar dapat digelar hingga tingkat desa yang memungkinkan terjadinya kontak antara kader Golkar dengan masyarakat.

Kemenangan yang diperoleh Golkar menjadi bukti keberhasilan strategi tiga jalur mobilisasi massa. Sugianti dan Majid (2021, hlm.7-8) menyebutkan bahwa strategi tersebut yakni pertama, jalur ABRI yang seperti disebutkan sebelumnya bahwa ABRI pada periode Orde Baru merupakan ranah kekuasaan yang memegang kendali atas pengawasan dan stabilator seluruh program pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena ABRI memiliki peran ganda ABRI yakni dalam urusan pertahanan dan keamanan serta pada ranah sosial-politik. Kedua, jalur Birokrasi yakni penerapan kebijakan monoloyalitas PNS yang mendorong seluruh PNS tidak memiliki pilihan lain selain memberikan dukungannya kepada Golkar. Ketiga, jalur Golkar dengan memilih isu pembangunan nasional sebagai alat untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Strategi ini yang kemudian akan menjadi pendorong Golkar tetap mampu mempertahankan kemenangannya di setiap pemilu yang digelar selama periode Orde Baru.

Dengan terpilihnya Soeharto sebagai presiden dimulailah babak baru pemerintahan Orde Baru dimana negara berasas Demokrasi Pancasila yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang diterapkan secara murni dan konsekuen. Program yang dicanangkan pemerintahan terpilih tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mulai diterapkan pada 1 April 1974 hingga 1 April 1979. Menurut Poesponegoro dan Notosusanto (2011, hlm.582) Repelita II dibuat berdasarkan evaluasi Repelita I, sehingga sasaran utama pada Repelita II adalah (1) sandang dan pangan yang memadai dan terjangkau untuk masyarakat; (2) bahan bangunan dan fasilitas umum yang memadai; (3) perluasan sarana dan prasana yang lebih baik; (4) pemerataan dan perbaikan kesejahteraan rakyat; (5) perluasan lapangan pekerjaan. Pada Repelita II juga dicanangkan program transmigrasi yang memindahkan 250.000 kepala keluarga dari Jawa, Bali, dan Lombok ke Sumatera Selatan, Kalimantan Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Program baru yang hadir pada Repelita II adalah Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dengan pengawasan pemerintah pusat.

Kondisi ekonomi yang mulai stabil serta kondisi politik yang mulai kembali dapat dikendalikan pemerintah mendorong kondisi sosial di masyarakat menjadi lebih stabil. Target pemerintah dalam perbaikan pada ranah pendidikan dapat melampaui target yang telah direncanakan baik dalam pengadaan segala bentuk fasilitas pembelajaran maupun peningkatan mutu pendidikan. Perbaikan dalam bidang ekonomi dan pendidikan diikuti oleh bidang komunikasi berupa siaran radio dan surat kabar yang pada pelaksanaan Repelita II sudah dapat menjangkau hingga ke desa-desa. Peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, mau pun komunikasi dapat meningkat dengan baik sesuai dengan target yang dibuat oleh pemerintah (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm.584-585). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang melemah pada awal berdirinya Orde Baru lambat laun dapat dipulihkan.

4.2 Gambaran Kondisi Sosial-Politik Indonesia Tahun 1973-1997 dalam Novel Wasripin dan Satinah

4.2.1 Penyederhanaan Partai Politik

Tatanan pemerintahan kembali dijalankan di bawah pimpinan Presiden Soeharto sebagai presiden terpilih. Di tengah perjalanan pemerintahan Soeharto pada periode tersebut bergulir pemikiran tentang penyederhanaan partai politik. Jika ditilik kembali sebenarnya ide penyederhaan partai politik dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Hal ini muncul setelah Presiden Soekarno melihat bahwa perpolitikan pada masa Demokrasi Liberal tidak stabil akibat jumlah partai politik yang begitu banyak. Kemudian hadir ketidaknyamanan masyarakat terhadap kondusifitas perpolitikan Indonesia pada periode Demokrasi Liberal yang dirasa berkaitan erat dengan jumlah partai politik pada periode tersebut. Kegaduhan politik dirasa tercipta berkat adanya berbagai konflik dari partai-partai politik yang berkecimpung di dalam perpolitikan Indonesia. Mas'ood (1989, hlm.23) mengemukakan bahwa kondisi tersebut diakibatkan oleh tiga faktor yakni partai politik yang terlalu berorientasi pada ideologinya masing-masing, fokus partai politik adalah kepentingan masing-masing dan menggunakan suara rakyat untuk merealisasikan kepentingan tersebut, serta pemilihan pemimpin partai yang memberikan celah sistem oligarki yang besar.

Secara etimologis, oligarki berasal dari bahasa Yunani yakni *oligarkhia* yang terdiri dari kata *oligoi* (beberapa atau segelintir) dan *arkhein* (memerintah) sehingga oligarki dapat diartikan sebagai sedikit yang memiliki wewenang memerintah. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa oligarki merupakan konsep yang digunakan untuk merujuk kepada bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh beberapa orang dengan tujuan utama dari kondisi tersebut adalah pemenuhan kepentingan orang yang bersangkutan (Koho, 2021, hlm.61). Masih dalam Koho (2021, hlm.62) disebutkan bahwa oligarki merupakan sistem politik dimana pemegang kendali teratas dalam pengambilan keputusan adalah partai politik. Sehingga perebutan kursi pimpinan partai menjadi sangat krusial baik itu dilakukan secara wajar maupun menggunakan uang. Dapat disimpulkan bahwa oligarki merupakan sistem politik dimana kekuasaan dikendalikan oleh segelintir orang yang dapat terhubung melalui kekayaan, ikatan keluarga,

kepentingan tertentu seperti agama, bisnis, politik, atau pun kekuatan militer. Pemerintahan tersebut memiliki karakter berupa kerjasama antara militer dan teknokrat sipil dalam memimpin negara, pemerintahan yang didukung penuh oleh para pemilik modal, pendekatan kebijakan yang banyak menggunakan pendekatan teknokratik, adanya mobilisasi massa, dan tindakan yang sifatnya mengekang untuk mengontrol kekuatan oposisi (Mahfud, 2003, hlm.117).

Oligarki yang merupakan kekuasaan segelintir pihak baik individu, keluarga, atau perusahaan tertentu yang mengontrol suatu negara atau organisasi sehingga oligarki dapat masuk kepada semua bentuk pemerintahan. Oligarki dapat menyusup ke dalam berbagai bentuk pemerintahan baik demokrasi, teokrasi maupun monarki. Hal ini dapat dilihat dari pemerintahan berbentuk demokrasi yang dapat dipengaruhi oligarki melalui kekayaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi pejabat-pejabat dalam pemerintahan. Contoh lain dapat dilihat dalam pemerintahan berbentuk monarki dimana oligarki dapat masuk ke dalam pemerintahan melalui penggunaan kekuatan militer maupun kekayaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi raja atau ratu yang tengah memerintah. Oligarki modern dapat berbasis agama, ras, maupun kekayaan seperti oligarki-oligarki pada era-era sebelumnya.

Hadirnya oligarki dalam sebuah pemerintahan tidak hanya mendorong hadirnya pergolakan sosial akibat adanya harapan ikut berkecimpung dalam kelas-kelas kekuatan negara. Meski sistem oligarki yang memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemainnya sehingga bukan hanya mampu menentukan bagaimana proses-proses ekonomi dan sosial berjalan. Dan menormalisasi kekerasan dalam menjalankan dan mengawal setiap program-program yang dijalankan pemerintah. Namun oligarki juga dapat mendatangkan nilai positif dalam pemerintahan seperti terjadinya stabilitas yang terjadi berkenaan dengan sedikitnya kepala yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mendorong efisiensi dan terciptanya keputusan yang cepat dimana diperoleh dari orang-orang yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Sehingga memberi kesempatan pada pihak-pihak yang lain untuk fokus pada pengembangan dirinya sendiri dan mendorong terjadinya banyak inovasi di berbagai bidang.

Usaha Presiden Soekarno untuk menciptakan suasana politik Indonesia yang tertib dengan jalan penyederhanaan partai politik dimulai dari diberlakukannya Perpers No. 7/1959 mengenai sistem kepartaian. Disusul dengan dicabutnya Maklumat Perintah 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik. Sehingga pihak-pihak yang mencoba untuk membentuk suatu partai politik harus memenuhi persyaratan dalam pembentukan suatu partai. Dari kebijakan tersebut pemerintah memutuskan bahwa hanya 10 partai yang memenuhi syarat yakni PKI, PNI, NU, Partai Indonesia (Partindo), Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, PSII, dan Perti. Upaya penyederhaan lain adalah dengan mengeluarkan Keppres No. 200 tahun 1960 untuk membubarkan Masyumi, dan Keppres No. 201 tahun 1960 untuk membubarkan PSI. Dengan diberlakukannya keputusan pembubaran PSI dan Masyumi maka pada tahun 1960 partai politik di Indonesia yang diakui secara resmi berjumlah 10 (Budiardjo, 1998, hlm.440-441). Kemudian Presiden juga mengeluarkan Keppres No. 128 Tahun 1961 yang berisi 8 partai politik yang diakui oleh negara yakni Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, Partai Syariat Islam Indonesia (PSII) dan IPKI.

Menurut Subekti (2014, hlm.75) pemerintah Orde Baru memiliki strategi politik yang bisa dijabarkan ke dalam delapan tahap secara berturut-turut yakni penghancuran PKI, konsolidasi pemerintahan dengan pemurnian Pancasila, penghapusan dualisme kepemimpinan, pengendalian kestabilan politik dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan Pemilu 1971, penyederhanaan partai politik, Sidang Umum MPR 1973, serta Penyusunan strategi kabinet pembangunan kedua. Strategi tersebut diterapkan guna terciptanya pembaharuan politik Indonesia dan keputusan pelaksanaan fusi partai politik dianggap cocok untuk mengurangi jumlah partai politik serta mempercepat pembaharuan yang diinginkan. Kedelapan langkah tersebut berhasil dijalankan terlihat dari hasil dan posisi dalam pemerintahan yang mampu dimiliki dan dipertahankan oleh pemerintah Orde Baru.

Penyederhanaan atau fusi partai politik sendiri bertujuan untuk mengganti partai-partai politik maupun lembaga politik lama dan membentuk suatu

lembaga atau partai yang baru. Partai politik menjadi sebuah urusan yang dirasa harus diurus dengan baik sebab partai politik merupakan sebuah kekuatan mobilitas massa yang mampu mempengaruhi proses pelaksanaan program-program pembangunan negara. Pemerintah Orde Baru sendiri memilih focus pada pembangunan ekonomi nasional, dalam ranah politik pun pemerintah Orde Baru berupaya menciptakan format dan pola-pola politik yang mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu Angkatan Darat sebagai salah satu kekuatan Orde Baru menilai bahwa jumlah partai politik yang terlalu banyak akan menyulitkan dalam proses konsensus mengenai dasar dan tujuan negara sebab parpol hanya akan menjadi oposisi yang berorientasi pada kepentingannya masing-masing. Sehingga penertiban partai politik harus lebih dulu dilakukan agar pembangunan ekonomi yang diupayakan dapat tercapai dengan baik. Dan penyederhanaan partai politik merupakan langkah efektif untuk mengontrol partai dan memusatkan kekuasaan di tangan penguasa (Iqbal dan Nasution, 2010, hlm.278-279).

Berbeda dengan penyebab penyederhanaan partai politik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berasal dari maraknya konflik politik akibat persaingan ideologi partai-partai yang ada. Pada pemerintahan Presiden Soeharto keputusan penyederhaan partai politik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan sesuai dengan jalur yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga pada periode Orde Baru perpolitikan Indonesia tidak begitu menonjol seperti pada pemerintahan Presiden Soekarno. Pada periode Orde Baru penyederhanaan partai politik mulai direncanakan sejak tahun 1966 pada Sidang MPRS IV, tahun 1966 dengan TAP No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan. Dalam ketetapan tersebut pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR sesegera mungkin membuat Undang-Undang mengenai kepartaian, keormasan, kekaryaan yang merujuk pada penyederhanaan (Andriyan, 2016, hlm.204-205).

Langkah awal yang diambil pemerintah dalam proses penyederhanaan partai politik adalah dengan melakukan rehabilitasi pada Partai Murba dan mengumumkan pendirian Partai Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) pada tanggal 20 Febuari 1968. Tujuan secara pendek dari diambilnya langkah tersebut

adalah untuk mempertahankan stabilitas dan kelancaran pembangunan nasional (Moertopo, 1974, hlm.73-74). Hal ini berkenaan dengan pembentukan wadah bagi berbagai partai politik berideologi islam yang pada saat itu memiliki hubungan yang kurang harmonis. Di atas kertas pendirian Parmusi tidak menjadi hal yang mencerminkan upaya penyederhanaan partai politik. Namun jika ditilik tindakan tersebut diperlukan guna memberi ruang untuk partai-partai dalam berkontribusi lebih besar pada upaya pembangunan negara. Dan hal tersebut dapat dicapai dengan hadirnya wadah yang mampu menyalurkan aspirasi-aspirasi politik secara efektif. Sehingga kegaduhan akibat perang ideologi partai dapat sedikit dikendalikan.

Pelaksanaan penyederhanaan partai politik sendiri terjadi pada tahun 1973 yang diterapkan kepada partai-partai politik peserta Pemilu 1971. Dari sembilan partai politik yang diakui negara, pemerintah menyederhanakan partai-partai tersebut menjadi dua partai baru. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terbentuk dari partai-partai berideologi islam. PPP sendiri dideklarasikan oleh DR. K.H. Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU, Mohammad Syafaat Mintaredja sebagai Ketua Umum PARMUSI, H. Rusli Halil Ketua Umum dari Perti serta H. Masjkur sebagai Ketua kelompok Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan yang telah terbentuk tersebut diketuai oleh Mohammad Syafaat Mintaredja yang berasal dari partai PARMUSI sebagai ketua umum. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia yang terbentuk dari lima partai yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba. Partai tersebut resmi terbentuk setelah penandatanganan deklarasi oleh Mohamad Isnaeni dan Abdul Madjid wakil dari PNI, A. Wenas dan Sabam Sirait wakil dari Parkindo, Ben Mang Reng Say dan F.S. Wignjosumarsono wakil dari Partai Katolik, Akhmad Sukarmadidjaja dan M. Sadrie wakil dari IPKI, serta Sugiarto Murbantoko dan John Pakan wakil dari Murba.

Berbeda dengan sembilan partai politik yang merasakan dampak dari penerapan penyederhanaan partai politik, Golkar sebagai salah satu peserta Pemilu 1971 tidak merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Hal ini berkenaan dengan Golkar melabeli dirinya sebagai kelompok golongan yang mawadahi berbagai kepentingan dan bukan sebuah partai politik. Sehingga berbagai aturan

yang mempersempit ruang gerak partai politik tidak berpengaruh terhadap Golkar. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong Golkar terus mampu berjaya selama pemerintahan Orde Baru. Selain itu sebagai golongan yang digagas oleh para perwira dan peserta pemilu yang mereprenstasikan pemerintah, Golkar juga terbebas dari intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan golongan tersebut pada pemilu.

Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa partai-partai politik yang bergabung dan membentuk partai baru merupakan pihak yang merasakan dampak paling besar dari kebijakan fusi. Dalam tubuh PPP yang terbentuk partai-partai dengan ideologi islam terdapat dua aliran pemikiran yakni aliran islam tradisional sebagai ideologi NU dan Perti serta aliran islam modern sebagai ideologi Parmusi dan PSII (Haris, 1991, hlm.9). Sedangkan PDI yang dibentuk dari partai-partai berideologi nasionalis dan partai agama non-islam harus bekerja keras untuk menyatukan pemikiran dan membangun keharmonisan partai. Meski partai-partai berideologi islam memberi sambutan lebih positif terhadap adanya fusi partai politik sebab berharap akan melahirkan kejayaan partai islam seperti pencapaian Masyumi pada era Orde Lama namun tak ayal baik PDI maupun PPP harus menghadapi konflik internal dan eksternal partai. PPP dan PDI pun memiliki tekanan untuk segera berbenah dan mulai melakukan berbagai upaya untuk mengenalkan partai tersebut kepada masyarakat dan menghadapi pemilihan umum yang akan datang.

Kebijakan fusi partai politik pada periode Orde Baru memberikan dampak yang signifikan terhadap perpolitikan Indonesia. Pertama, Intervensi yang dilakukan negara dengan alasan pembinaan politik mendorong tumbuh dan berkembangnya politisi yang memiliki pandangan yang serupa dengan pemerintah. Kedua, cara pandang dan penyelesaian permasalahan yang diambil oleh partai lebih banyak menggunakan pendekatan militer sebab pengendalian dan pembinaan politik dari kalangan militer yang intens (Yulianto, 2002, hlm.217). Ketiga, Partai dan Golkar sebagai organisasi politik tidak akan mampu menjadi organisasi yang mandiri. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan pimpinan partai politik yang harus memiliki keinginan untuk sejalan dengan

pemerintah. Pemimpin partai dipilih berdasarkan kepatuhannya terhadap pemerintah. Bila didapatkan pemimpin partai yang kritis, berhaluan keras, dan banyak mempertanyakan gagasan dan program-program pemerintah maka pemerintah cenderung turun tangan dalam urusan internal partai.

Penyederhanaan partai politik sesungguhnya bukan hanya berdampak pada partai-partai politik yang menjadi objek penyederhanaan namun juga bagi masyarakat yang harus kehilangan wadah untuk berpolitik. Hal ini berkenaan dengan konsekuensi besar yang harus ditanggung apabila berseberangan dengan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diciptakan pemerintah selain bertujuan sebagai upaya memberi kesejahteraan pada masyarakat namun juga sebagai cara guna mempertahankan kekuasaan yang telah dimiliki. Hal ini dapat terlihat dari proses-proses pemilu yang terjadi selama Orde Baru. Dapat dikatakan bahwa kondisi-kondisi yang terjadi pada perpolitikan Indonesia merupakan manipulasi tumbuh kembangnya politik Oligarki pada pemerintahan periode Orde Baru.

Ranah politik yang dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu sendiri dapat dilihat pada perpolitikan Indonesia periode Orde Baru. Sejak periode tersebut berlangsung dari tahun 1966 hingga berakhir pada tahun 1998 pemerintahan dan perpolitikan Indonesia dikepalai oleh Soeharto dan Golkar sebagai alat politik dari periode tersebut. Posisi Golkar yang kokoh di dalam pemerintahan dapat diperoleh berkat berbagai siasat yang dipersiapkan secara matang. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa pemerintahan Orde Baru memiliki strategi politik yang dituangkan kedalam delapan langkah yang mampu direalisasikan dengan baik. Salah satu poin dalam strategi tersebut adalah memenangkan Pemilu 1971. Dengan kemenangan pada pemilu tersebut pemerintah dengan memanfaatkan Golkar mampu mengontrol kekuasaan dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan berbagai peraturan yang memuluskan jalan Golkar dalam segala proses yang berkaitan dengan perpolitikan di Indonesia. Setiap pemilu yang dilangsungkan pada periode tersebut menjadi salah satu langkah yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

Dari cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahan Indonesia pada periode Orde Baru dapat dikatakan bahwa pemerintahan tersebut dijalankan

dengan prinsip-prinsip oligarki. Pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang dipegang oleh sebagian kecil masyarakat diketuai oleh Soeharto sebagai pimpinan negara. Oligarki sendiri memiliki ciri yakni pertama, kekuasaan dikendalikan oleh sebagian kecil dari masyarakat. Lalu kekuasaan dan uang tidak dapat dipisahkan berkenaan dengan sebagian kecil masyarakat yang berkuasa adalah pihak yang memiliki uang. Sehingga terjadi kesenjangan yang memicu banyak konflik sosial akibat dari kekuasaan yang dimiliki hanya digunakan untuk mempertahankan kekayaan. Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan menjadi tujuan utama dari pemerintahan yang tengah berkuasa.

Menurut Winters (2011, hlm.48-54) ada lima tipe oligarki. Pertama, oligarki panglima yang memiliki tingkah perpecahan yang sangat tinggi berkenaan dengan konflik dan klaim atas kekayaan negara yang saling tumpang tindih. Kedua, oligarki kolektif yang dipegang oleh penguasa kolektif dalam bentuk senat. Ketiga, oligarki sultanistik dimana monopoli kekuasaan berada ditangan satu orang dan sistem hukum sebagai sistem kekuasaan hukum yang sifatnya pribadi. Oligarki sultanistik juga mendorong maraknya praktik patron-klien dengan suatu norma dan kewajiban tertentu. Keempat, oligarki sipil dimana cara memonopoli kekuasaan hampir serupa dengan oligarki sultanistik namun dalam oligarki sipil peran individu tersebut digantikan oleh sebuah lembaga yang dikendalikan oleh hukum. Kelima, oligarki jinak dan liar dimana terdapat sistem yang digunakan untuk mengendalikan oligark berupa penerapan biaya atau denda untuk perilaku sosial oligark yang paling merugikan.

Sistem oligarki yang mengakar pada pemerintah periode Orde Baru sendiri lebih condong kepada tipe oligarki sultanistik. Hal ini dapat terlihat dari monopoli kekuasaan yang berada di tangan satu orang yakni Presiden Soeharto dengan Golkar sebagai alat pengendali kekuasaan dan ABRI sebagai alat yang digunakan untuk menjaga kestabilan sosial. Selain itu para oligark menguasai dan memanfaatkan kekuasaan negara serta lembaga-lembaga negara untuk kepentingan pribadi secara instrumental, adanya disorganisasi sistematis dalam hubungan negara dan masyarakat serta adanya sistem patronase yang kompleks dan meluas baik pada lapisan pemerintahan pusat maupun pemerintah tingkat

desa (Ananta, 2017, hlm.107). Seperti yang telah dibicarakan bahwa pada tipe oligarki sultanistik tumbuh dan berkembang secara subur praktik patron-klien. Patron-klien terdiri dari dua kata yakni patron dan klien. Secara etimologis patron memiliki arti seseorang yang memiliki kekuasaan, wewenang, dan pengaruh sedangkan klien berarti bawahan. Sehingga dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara satu pihak dengan kedudukan dan status ekonomi lebih tinggi yang menggunakan hal yang dimilikinya untuk memberikan manfaat bagi klien yang merupakan pihak yang lebih rendah sebagai imbalan dari dukungan, bantuan, dan pelayanan yang diberikan klien untuk seorang patron.

Philipus dan Aini (2006, hlm.43) berpendapat bahwa suatu hubungan antara patron-klien memiliki ciri berupa adanya ketidak seimbangan status antara patron dan klien, posisi patron lebih tinggi meski klien merupakan pihak yang membantu patron, dan adanya ketergantungan klien terhadap patron akibat hutang budi. Dalam urusan imbalan seorang klien akan menyediakan tenaga untuk urusan pemenuhan kebutuhan atau klien akan menyediakan sumber daya untuk kepentingan politik dari patron yang dimilikinya. Bentuk imbalan yang dibicarakan dapat berupa uang, persetujuan sosial, penghormatan atau penghargaan dapat juga berupa kepatuhan. Hal ini tergantung kepada bentuk layanan yang diberikan klien serta permintaan yang dimiliki patron yang bersangkutan. Catatan penting dari hubungan patron-klien ini adalah imbalan yang diberikan klien dapat diberikan oleh siapa saja sedangkan imbalan patron hanya dapat diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki status yang lebih tinggi.

Kondisi hubungan patron-klien dapat dilihat dalam praktik birokrasi Indonesia pada periode Orde Baru. Tercatat bahwa kinerja birokrasi periode Orde Baru merupakan kondisi yang paling buruk selama pemerintahan Indonesia. Hal ini diyakini akibat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak maksimal. Birokrasi yang bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut bekerja secara lamban serta mementingkan prosedur (Istianda dan Darmono, 2009, hlm.123). Masyarakat yang memiliki kepentingan harus mengeluarkan uang, tenaga, serta waktu yang lebih untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan birokrasi. Berbeda dengan hal-hal yang

merujuk kepada kepentingan pimpinan pemerintahan yang akan diurus secara cepat dengan sebaik mungkin. Pola-pola tersebut muncul dari proses perekrutan birokrasi yang dilakukan oleh pimpinan kekuasaan bukan berdasarkan kepada kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga memberi kesan baik kepada atasan lebih diutamakan dibandingkan dengan bekerja maksimal sesuai tanggung jawab yang diemban.

Dengan maraknya praktik patron-klien dalam sistem politik oligarki sultanistik menjadikan Presiden Soeharto serta pejabat-pejabat pemerintahan tingkat tinggi sebagai poros dari segala aspek kehidupan masyarakat. Seluruh kegiatan pemerintahan dilakukan guna memenuhi kepentingan patron sebagai atasan klien yang merupakan pejabat birokrasi maupun militer pada tingkatan lebih rendah dari patron. Kondisi tersebut mendorong berbagai penyelewengan dan kecurangan dalam tubuh pemerintah. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi hal yang lumrah dan sangat melekat dengan pemerintah Orde Baru. Politik uang dimana pihak yang memiliki uang besar dan membayar mahal dapat turut campur dalam politik maupun ekonomi negara. Pendekatan militer yang digunakan pemerintah dan pihak keamanan dalam menertibkan lingkungan dan masyarakat menciptakan ketegangan tersendiri di dalam masyarakat yang tak ayal mendorong terjadi berbagai konflik di masyarakat.

Oposisi sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan pihak yang menemukan dan mengemukakan pandangan terhadap pemerintahan yang berlangsung tidak dapat bekerja dengan baik. Kondisi tersebut terjadi akibat sempitnya ruang gerak masyarakat dan media massa dalam beropini mengenai politik dan pemerintahan Orde Baru. Tercatat pada periode tersebut terjadi pembredelan terhadap pers dan media massa serta adanya pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan media massa dan pers untuk menyajikan berita-berita yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat Orde Baru. Selain itu partai politik pun mendapat intervensi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Gelombang protes mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dituangkan melalui demonstrasi-demonstrasi. Namun kondisi-kondisi tersebut dapat diredam pemerintah dengan pendekatan-pendekatan bersifat militer. Dapat

dikatakan bawah pada periode tersebut terjadi berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam upaya pemerintah menjaga kestabilan politik dan negara.

Selain kebebasan berbicara mengenai politik dan pemerintah, pada periode Orde Baru tercatat sebagai masa dimana kekerasan menjadi jalan yang diambil dalam proses penyelesaian masalah. Meski pada periode tersebut telah terbentuk Komnas HAM namun jumlah pelanggaran HAM masih pada tingkat tinggi. Kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu penyumbang pelanggaran HAM yang efeknya bisa sampai menghilangkan nyawa. Sebagai contoh adalah pelaksanaan Petrus atau Penembak Misterius yakni peristiwa penghilangan nyawa orang yang diyakini sebagai preman, tukang gali, dan pembuat onar tanpa melalui proses persidangan atau penyelidikan terlebih dahulu. Selain itu, sanksi terhadap orang-orang yang dituduh mengancam kelangsungan negara tanpa melewati proses penyelidikan marak terjadi pada periode tersebut. Tuduhan yang dilayangkan adalah keterlibatan dari pihak yang bersangkutan dengan organisasi yang digambarkan sebagai mimpi buruk negara seperti PKI, DI/TII, maupun pihak-pihak lain yang telah diberi label sebagai ancaman bagi kestabilan Indonesia.

4.2.2 Kuntowijoyo dan Pemikiran Tentang Sastra Sejarah

Kuntowijoyo lahir pada 18 September tahun 1943 di daerah Sorobayan, Sanden, Bantul Yogyakarta dari pasangan H. Abdul Wahid Sastroatmojo dan Hj. Warasti. Kuntowijoyo lahir dari keluarga seniman dimana ayahnya merupakan seorang dalang dan pembaca macapat dan kakek buyutnya merupakan seorang penulis mushaf Al-Quran atau *Khathath*. Meski lahir di Bantul, Kuntowijoyo lebih banyak menghabiskan waktunya di Klaten. Hal ini mendorong ia melekat dengan dua budaya Jawa yakni Yogyakarta dan Surakarta. Kedua budaya tersebut memang terlihat serupa karena keduanya merupakan dua budaya yang merujuk pada budaya kejawaan namun corak di antara keduanya dapat dirasakan perbedaannya. Kuntowijoyo mengemukakan bahwa budaya Jawa yang melekat pada budaya Yogyakarta bersifat seadanya-gagah-maskulin-aktif yang diperoleh dari awal kelahiran budaya tersebut yang berasal dari seorang prajurit yang

memberontak dan terusir (Fahmi, 2005, hlm.30). Sedangkan budaya Surakarta lebih bersifat kenes-penuh bunga-feminis-kontemplatif, karena terlahir di tengah kenyamanan dan kemapanan. Dan kedua budaya ini lah yang mewarnai pemikiran Kuntowijoyo.

Kuntowijoyo berasal dari keluarga *priyayi* Jawa yang didapat dari kakeknya yang merupakan seorang lurah, seniman, ulama, petani dan pedagang. Selain itu keluarganya juga berisi orang-orang yang memegang syariat Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Masa kecilnya ia habiskan dengan belajar mendongeng dan berdeklamasi di sebuah surau kecil di Desa Ngawongo Kecamatan Ceper, Klaten kepada dua orang sastrawan penting dalam dunia kesusasteraan Indonesia yakni M. Saribi Arifin dan Yusmanan (Anwar, 2007, hlm.3). Kegiatan belajar mendongeng dan berdeklamasi serta mengaji berlanjut hingga Kuntowijoyo menginjak sekolah dasar. Selain itu Kuntowijoyo juga gemar mengunjungi perpustakaan kota kecamatan untuk membaca. Memasuki SMP Kuntowijoyo senang membaca karya-karya dari Hamka, H. B. Jassin, Pramodya Ananta Toer, dan Nugroho Notosusanto. Cakupan bacaan Kuntowijoyo semakin meluas ketika ia masuk jenjang SMA dimana ia mulai membaca karya-karya Charles Dickens dan Anton Chekov.

Kegemaran Kuntowijoyo dalam membaca berbagai karya sastra terus ia bawa hingga ke bangku perkuliahan. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, Kuntowijoyo makin menyamakan dirinya dalam bidang sastra. Hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya novel pertamanya berjudul *Kereta Api yang Berangkat di Pagi Hari* pada tahun 1964 lalu pada tahun 1967 ia menerbitkan cerita pendek pertamanya di *Majalah Sastra Horison*. Selain aktif dalam seni sastra Kuntowijoyo juga tercatat aktif dalam seni teater dan menjadi salah satu pelopor berdirinya Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi) dan Studi Grup Mantika bersama Dawan Rahardjo, Sju'bah Asa, Chaerul Umam, Arifin C. Noer, Amri Yahya, Iknagara, dan Abdul Hadi W. M. Setelah mendapat gelar Sarjana dalam bidang ilmu sejarah, Kuntowijoyo melanjutkan pendidikannya di University of Connecticut, Amerika pada tahun 1974 dan pendidikan doctoral di Colombia University, Amerika tahun 1980.

Selama masa perkuliahannya, Kuntowijoyo tercatat sebagai penulis yang produktif terbukti dengan terciptanya berbagai karya dari sosok hebat tersebut.

Menurut Anwar (2007, hlm.3) darah seni yang dimiliki Kuntowijoyo dari ayah dan kakeknya memberi pengaruh tersendiri terhadap karya-karya yang diciptakan oleh Kuntowijoyo. Pekerjaan sang eyang yang merupakan seorang dalang dan pembaca macapat serta sang kakek yang seorang *khathath* mendorong karya-karya ciptaan Kuntowijoyo begitu dekat dengan kebudayaan Jawa. Karya-karya Kuntowijoyo yang banyak memuat tradisi dalang dan hal-hal yang berunsur agama Islam menjadi salah satu bukti bahwa lingkungan tempat ia hidup memberi pengaruh yang besar bagi terciptanya sebuah karya. Tercatat Kuntowijoyo juga pernah mengemukakan bahwa karya-karyanya merupakan hasil endapan pengalaman-pengalamannya selama ia hidup. Sehingga ia yang begitu dekat dengan pengalaman berpindah-pindah tempat tinggal, kedekatannya dengan surau, interkasinya dengan pasar dan kereta api serta hasil bacaan dari berbagai buku yang ia nikmati dapat tertuang dengan baik dalam karya-karya yang diciptakannya.

Selama hidupnya Kuntowijoyo dapat dikategorikan sebagai seorang penulis produktif yang telah melahirkan berbagai karya baik fiksi maupun ilmiah. Dalam bidang sastra Kuntowijoyo tercatat telah melahirkan berbagai cerpen, puisi, dan novel. Cerpen-cerpen yang dikarang oleh Kuntowijoyo yakni *Dilarang Mencintai Bunga-Bunga* (1993), *Pistol Perdamaian* (1995), *Laki-Laki Kawin Dengan Peri* (1996), *Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan* (1997), *Mengusir Matahari; Fabel-Fabel Politik* (1999), *Hampir Sebuah Subversi* (1995). Kemudian novel yang tercipta dari tangan Kuntowijoyo yakni *Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari* (1996), *Pasar* (1972), *Khotbah di atas Bukit* (1976), *Impian Amerika* (1997), *Mantra Pejinak Ular* (2000), *Waspirin Dan Satinah* (2003). Selain itu Kuntowijoyo juga menghasilkan karya berupa naskah drama dan puisi diantaranya *Rumput-rumput Danau Bento* (1996), *Tidak Ada Waktu Bagi Nyonya Fatma, Barda Dan Cartas* (1972), *Topeng Kayu* (1973), *Isyarat* (1976), *Suluk Awing-Uwung* (1976), *Daun Makrifat, Makrifat Daun* (1995).

Dalam bidang keilmuan, Kuntowijoyo juga telah melahirkan berbagai tulisan seperti *Dinamika Sejarah Umat Islam* (1985), *Budaya dan Masyarakat* (1987), *Paradigm Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (1991), *Radikalisasi Petani* (1994), *Demokrasi dan Budaya Birokrasi* (1994), *Pengantar Ilmu Sejarah* (1994), *Metodologi Sejarah* (1997), *Pengantar Ilmu Sejarah* (1997), *Identitas Politik Umat Islam* (1997), *Muslim Tanpa Masjid, Esei-Esei Agama, Budaya, Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (2001), *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas; Esai-Esai Budaya dan Politik* (2002), *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940* (2002), *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915* (2004), *Islam Sebagai Ilmu: Epistemology, Metodologi dan Etika* (2004).

Dari berbagai karya yang telah dihasilkan Kuntowijoyo berhasil meraih berbagai penghargaan berupa Hadiah pertama dari majalah sastra 1968 dan penghargaan penulisan sastra dari pusat pembinaan bahasa 1994 untuk cerpen "Dilarang Mencintai Bunga-Bunga", Hadiah harapan dari Badan Pembina Teater Nasional Indonesia (BPTNI) untuk naskah drama "Rumput-Rumput Danau Bento" pada 1968, Hadiah dari dewan kesenian Jakarta untuk naskah drama "Tidak Ada Waktu Lagi Bagi Nyonya Fatma, Barda, Certas" pada 1972, dan "Topeng Kayu" pada 1973, Hadiah dari panitia buku internasional untuk novel "Pasar" pada 1972, Cerpen terbaik untuk "Pistol Perdamaian", "Laki-Laki Yang Kawin Dengan Peri", dan "Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan" secara berturut-turut pada tahun 1995, 1996, 1997, Penghargaan sastra Indonesia dari Pemerintah Daerah DIY 1986, Penghargaan kebudayaan ICMI 1995, Asean Award on culture 1997, Mizan Award 1998, Kalyanakretya Utama untuk Teknologi Sastra dan Materi Riset dan Teknologi 1999 (Fahmi, 2005, hlm.72).

Dalam proses kreatif yang dijalani Kuntowijoyo selama penciptaan karya-karyanya ia mengaku menuangkan pikiran-pikiran yang ia anggap baik. Ia mengemukakan bahwa selama menulis tidak memiliki resep apapun selalu berjalan sedianya saja. Baginya menulis karya fiksi merupakan proses dari pengendapan pengalaman. Hal ini tidak lepas dari kebiasaannya yang kerap menulis pengalaman dan kesehariannya dalam bentuk sinopsis. Dari catatan-catatan itulah muncul ide-ide untuk karya-karya sastra ciptaannya. Kuntowijoyo

juga menyebutkan bahwa dalam setiap karya sastra yang ia ciptakan terdapat prinsip berupa *three in one* yang merupakan struktur pengalaman, struktur imajinasi, dan struktur nilai atau pesan yang ingin disampaikan (Anwar, 2007, hlm.5). Sehingga dalam setiap cerpen dan novel hasil ciptaan Kuntowijoyo selalu kental dengan gagasan atau pesan-pesan disamping memiliki kekuatan imajinasi dan berbagai pengalaman. Meski begitu menurutnya karya sastra tetap tidak boleh diperlakukan seperti karya ilmiah yang nilainya berpijak pada argumentasi dan fakta semata.

Selain itu untuk menciptakan karya sastra yang memiliki aspek deskriptif-naratif yang kuat, Kuntowijoyo menulis karyanya dengan dua cara yakni menulis sastra dari dalam dan menulis sastra dari bawah (Kuntowijoyo, 2005, hlm.17). Menulis sastra dari dalam dapat maksudnya adalah peristiwa-peristiwa yang ditulis di dalam novel harus dipahami seperti tokoh-tokoh dalam cerita memahami kehidupannya sendiri. Sederhananya tokoh-tokoh dalam karya yang bersangkutan tidak dijadikan alat kepentingan Kuntowijoyo. Salah satu karya dengan gaya penulisan ini adalah novel “Wasripin dan Satinah” dimana tokoh-tokoh yang ada di dalam novel tersebut tidak melihat peristiwa penindasan yang terjadi sebagai marjinalisasi islam. Kemudian cara menulis dari bawah maksudnya sastrawan tidak menulis berdasarkan teori atau konsep tertentu. Sederhananya sastrawan hanya harus terus konsisten menggambarkan tokoh-tokoh yang ada agar sesuai dengan plot dan tema cerita. Cara menulis tersebut merupakan cara yang kerap digunakan Kuntowijoyo dalam menciptakan narasi dalam cerpen dan novel-novel ciptaanya.

Sebagai seorang sastrawan yang memiliki formula tersendiri dalam setiap proses penciptaan karya-karyanya, Kuntowijoyo juga memiliki gagasan tersendiri dalam memandang sastra. Sebuah sastra dipandang Kuntowijoyo bukan hanya rangkain kata-kata indah dengan tema tertentu yang ditujukan sebagai hiburan namun kisah-kisah yang tersaji seyogianya memberi nilai dan telaah. Hal ini sejalan dengan makna kata sastra itu sendiri. Pada sekitar tahun 80-an berkembang pemikiran sastra konstektual yang digagas Arief Budiman yang mendorong menjadi sastra sufistik dan sastra profetik. Aliran sastra tersebut begitu melekat pada sosok Kuntowijoyo sebab ia menjadi pengagas

prinsip penulisan sastra profetik. Sastra profetik sendiri dapat dipahami sebagai sastra yang dalam ceritanya mengandung seruan yang mengingatkan manusia akan adanya Tuhan. Sastra profetik atau sastra sufistik mencoba untuk kembali mengabungkan seni dan penciptaan dengan kehidupan yang lebih luas, di dalamnya mencoba untuk menyatukan hal duniawi dengan batin, atau hal-hal yang berkaitan dengan maunis dan tuhannya (Anwar, 2007, hlm.)

Sastra profetik atau sufistik diterjemahkan Kuntowijoyo sebagai sebuah karya sastra yang mencoba mengemukakan perlawanan terhadap sistem-sistem sosial yang mendorong penurunan derajat manusia atau hal-hal yang bersifat *dehumanisasi*. Sastra profetik atau semula Kuntowijoyo menyebutnya sebagai sastra transedensial tersebut memiliki rujukan yang lebih luas dibandingkan dengan sastra keagamaan meski keduanya kerap kali disamakan. Hal ini terlihat dari rujukan-rujukan yang dipakai Kuntowijoyo untuk membentuk prinsip penulisan karya-karya tersebut bukan hanya dari kepercayaan yang dimiliki namun juga melihat tulisan-tulisan para ahli yang tidak memiliki kepercayaan yang sama. Baik sastra keagamaan maupun sastra profetik keduanya mengungkapkan perasaan dan pengalaman seseorang dalam menjalani kehidupan berupa perasaan dosa, takut, dan mengenai kebesaran Tuhan. Dalam sastra keagamaan gerak individu dalam menyikapi gejolak perasaan dan pengalaman kehidupan lebih banyak tampil secara harfiah dan mengedepankan doktrin sedangkan dalam sastra profetik lebih cair sehingga menyatu dengan estetika dari karya yang bersangkutan (Anwar, 2005, hlm.11-12).

Pandangan bahwa sebuah karya sastra harus membawa kemerdekaan dan mendorong peningkatan humanisasi juga coba diterapkan Kuntowijoyo di dalam sejarah. Kuntowijoyo memandang bahwa sejarah seyogianya disajikan tidak semata berupa deskripsi dan analisis namun hendaknya mendorong tumbuh dan berkembangnya kesadaran sejarah. Dapat dikatakan bahwa Kuntowijoyo menjadikan agama sebagai fondasi dan sumber inspirasi bagi sebuah ilmu pengetahuan termasuk dalam hal ini adalah ilmu sejarah dan sastra-sastra yang ia ciptakan. Dalam memandang sejarah, Kuntowijoyo berhadap agar historiografi sebagai produk sejarah dapat hadir sebagai sebuah bentuk yang dikembangkan untuk melayani masyarakat tanpa menghilangkan sisi akademik

dari disiplin ilmu tersebut. Kuntowijoyo juga tidak mempermasalahkan mengenai fungsi sejarah sebagai ilmu dan sebagai gerakan sosial sebab Kuntowijoyo cenderung menggabungkan keduanya dalam tulisan yang ia miliki. Hal ini berkenaan dengan asumsinya bahwa sejarah yang dituangkan dalam sebuah historiografi Indonesia sebagai bentuk kebebasan dari hal-hal yang menyangkut kolonial dan ruang terhadap kelompok-kelompok yang tertindas dan termarginalkan untuk memiliki sebuah sejarah.

Kuntowijoyo juga menawarkan ilmu sejarah menjadi ilmu yang lebih egalitarian namun tidak menjadi disiplin yang mengadopsi teori-teori sosial dari Barat secara penuh tanpa ada sumbangan pemikiran dari dalam negeri. Hal ini dapat mendorong hadirnya penulisan sejarah yang jauh lebih dinamis, bermanfaat, dan relevan dengan menghadirkan hubungan transcendental pada kepercayaan terhadap tuhan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menanamkan pemikiran bahwa tugas manusia di bumi ini adalah sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab untuk membangkitkan kesadaran sejarah. Dalam tulisan yang dihasilkan oleh Kuntowijoyo memuat konsep humanisasi, liberasi dan transendensi dimana konsep-konsep tersebut ilmu sosial profetik yang ia kembangkan (Kuntowijoyo, 2004, hlm.97). Dapat dikatakan bahwa Kuntowijoyo merupakan salah satu sejarawan yang mendukung aliran sejarah sosialis dimana Kuntowijoyo mencoba menggali dan menyajikan perspektif sejarah bukan hanya dari orang-orang besar yang terbiasa memiliki panggung dalam sejarah namun dari sisi orang-orang kecil yang terkadang terlewat oleh sejarah. Hal ini sesuai dengan konsep-konsep profetik yang ia kembangkan yakni humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Kuntowijoyo dapat disebut sebagai sosok paket lengkap dimana baik sebagai seorang sejarawan, sastrawan, maupun seorang cendekia Islam mampu menyeimbangkan ketiganya dan menjadi ahli yang hingga kini karya-karyanya masih dinikmati untuk berbagai kepentingan. Sebagai seorang pribadi Kuntowijoyo dikenal sebagai sosok yang sederhana dimana terlihat dari bagaimana ia menjalani keseharian bersama keluarganya. Kuntowijoyo juga dikenal sebagai sosok yang produktif terlihat dari berbagai tulisan yang telah ia terbitkan baik dalam bidang sejarah, sastra maupun karya-karya bernapas

Islam. Produktifitas Kuntowijoyo tidak mampu dihentikan meski oleh penyakit yang membuat Kuntowijoyo kesulitan bergerak dan berbicara. Ia mampu terus menciptakan berbagai karya meski dalam proses pengobatan yang ia jalani. Hingga pada 22 Februari 2005 ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak.

4.2.3 Gambaran Kondisi Sosial-Politik Indonesia Tahun 1974-1997 dalam Novel Wasripin dan Satinah

Dalam tulisan ini penulis menggunakan sosiologi sastra untuk melihat fakta-fakta sosial di dalam sebuah karya sastra. Sosiologi sastra merupakan kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat yang dilakukan dengan mengkaji mengenai lembaga sosial dan proses sosial masyarakat (Damono, 1984, hlm.6). Sosiologi sastra digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang terkandung dalam suatu karya sastra. Sosiologi dan sastra memiliki kaitan yang erat satu sama lain dimana sastra menjadi sebuah refleksi dari kondisi suatu lingkungan, sosial, budaya berdasarkan kepada hasil pengembangan dari sebuah dialektika antara seorang pengarang dengan kondisi sosial yang membanggunya (Endraswara, 2003, hlm.78). Kajian tersebut dilakukan dengan membedah pola-pola sosial yang terkandung di dalam sebuah karya sastra. Dapat dikatakan bahwa kajian sosiologi sastra merupakan kajian yang berupaya menemukan aspek-aspek sosial yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Hadirnya sebuah karya sastra juga dapat dilihat sebagai sebuah dokumen sosial dimana di dalamnya merekam bagaimana kondisi sosial suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu pada satu waktu tertentu.

Sebuah karya sastra dapat dikatakan sebagai bagian dari suatu lembaga sosial sebab karya sastra dihasilkan oleh sastrawan yang merupakan bagian dari masyarakat dalam suatu sistem sosial. Menurut Ratna (2003, hlm.2) aspek-aspek kemasyarakatan adalah sebuah latar belakang lahirnya sebuah karya sastra. Seorang sastrawan terikat secara emosional dengan suatu kelompok sosial tertentu baik melalui pendidikan, agama, maupun tradisi dan adat istiadat (Sujarwa, 2019, hlm.12-14). Sehingga karya sastra yang dihasilkan seorang sastrawan dapat dikaji oleh sosiologi sastra apabila karya yang bersangkutan

mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya. Unsur-unsur sosial tersebut dapat berupa unsur kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang serta kebudayaan. Kisah rekaan dalam karya sastra yang meramu unsur-unsur sosial suatu kelompok masyarakat seyogianya mengandung unsur-unsur sosial yang sebenar-benarnya dan dapat dibuktikan dan diidentifikasi asal dari unsur yang dirujuk dalam karya yang bersangkutan.

Permasalahan dalam kajian sastra dapat berupa isi, tujuan, dan hal-hal yang tersirat di dalam karya sastra. Dalam hal ini karya sastra dapat mencakup (1) aspek nilai berupa nilai religi, nilai persahabatan, nilai sosial, atau nilai didaktik; (2) aspek moral berupa permasalahan korupsi, pelacuran, kedermawanan, penindasan atau kasih sayang; (3) aspek etika berupa pertemanan atau interaksi antara laki-laki dan perempuan; (4) aspek religius berupa keimanan, ibadah, atau hukum yang dimiliki suatu kepercayaan; (5) aspek adat istiadat; dan (6) aspek sosial yang mencakup sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, sosial religi, sosial pendidikan, maupun sosial kemasyarakatan (Sutejo dan Kasnadi, 2016, hlm.7). Aspek tersebut dapat ditemukan secara mendalam baik melalui tokoh-tokoh dan penokohnya, latar cerita dalam karya sastra maupun narasi dalam karya tersebut.

Banyak ahli telah merumuskan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan saat membedah sebuah sastra dengan sosiologi sastra. Mulai dari kajian yang membedah karya sastra dengan meminjam teori-teori sosiologi secara utuh seperti teori strukturisme dan teori konflik sosial. Dalam penelitian ini penulis membedah karya sastra dengan mengkaji unsur-unsur karya sastra baik unsur instrinsik maupun unsur ekstrinsik karya tersebut. Kondisi tersebut dipilih sebab penelitian yang dilakukan bermaksud untuk membedah kondisi sosial yang terjadi pada masa Orde Baru yang coba digambarkan dalam novel Wasripin dan Satinah serta membandingkannya dengan kondisi yang sesuai dengan fakta yang telah dianalisis oleh para sejarawan. Sehingga kajian yang dilakukan bukan hanya mencoba melihat kondisi sosial suatu masyarakat pada masa tertentu namun juga mencoba melihat peristiwa sejarah yang terjadi pada waktu dan tempat yang bersangkutan.

Orde Baru merupakan periode pemerintahan dalam sejarah Indonesia yang merujuk pada pemerintahan Soeharto. Penggunaan istilah Orde Baru dipilih dengan asumsi bahwa Orde Baru merupakan pemerintahan yang lepas dari segala hal kurang baik yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa pemerintahan tersebut menerapkan sistem Demokrasi Pancasila yang ditunggangi sistem politik oligarki sultanistik yang mendorong berkembangnya monopoli kekuasaan oleh sekelompok kecil masyarakat dan maraknya praktik parton-klien. Meski sistem oligarki memberikan ruang yang luas bagi pihak yang tidak dapat ikut campur dalam perpolitikan untuk mengembangkan diri dengan mendalami berbagai pengetahuan dan fokus pada hidupnya namun kondisi tersebut tetap mendorong permasalahan jangka panjang dari pihak-pihak yang merasa tidak mendapat tempat dalam politik dan berkeinginan untuk ikut berpolitik.

Disamping dampak oligarki yang mempersempit celah masyarakat ikut campur dalam urusan politik dan berbagai penyelewengan kekuasaan yang telah dilakukan pemerintah Orde Baru, kondisi ekonomi yang semula mengkhawatirkan lambat laun mulai kembali mengalami peningkatan. Kondisi sosial pun sudah mulai stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya kembali. Tingkat partisipasi masyarakat yang kecil dalam perpolitikan mendorong masyarakat mengalihkan fokusnya pada bidang yang lain baik itu aktualisasi diri maupun pengembangan aspek-aspek kehidupan yang lain. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan sastra Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena sastra bukan hanya dijadikan media hiburan namun melalui karya puisi, kisah dalam novel maupun naskah drama juga dijadikan media untuk mengungkapkan kegelisahan dan kondisi masyarakat pada periode tersebut. Langkah tersebut diambil sebab pemerintah membatasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan opininya terhadap perpolitikan dan kondisi sosial di tengah masyarakat.

Sastrawan sebagai bagian dari masyarakat yang ikut hidup dan merasakan berbagai perubahan yang terjadi merespon berbagai perubahan dan kondisi yang ada melalui berbagai karya sastra yang dibuatnya. Seperti sejarah yang memiliki kekhasan masing-masing pada setiap perkembangannya, sastra pun mengalami

hal yang serupa sehingga pembabakan perkembangan sastra menjadi hal yang dipilih untuk memudahkan dalam proses pengembangan sastra bersangkutan. Dalam sastra sendiri pembabakan dapat dilihat dari tiga hal yakni bentuk, angkatan, dan tahapan yang menyajikan pola penyajian yang berbeda (Erowati dan Bahtiar, 2011, hlm.14). Dari ketiga dasar tersebut pembabakan berdasarkan periode merupakan pilihan dengan tingkat objektivitas yang lebih tinggi sebab identifikasi dan klasifikasi dilakukan berdasarkan pemilihan waktu sehingga dapat lebih terlihat periode yang menaunginya (Erowati dan Bahtiar, 2011, hlm.15).

Orde Baru sendiri melewati dua periode pembabakan sastra yakni periode 1961-1971 dan periode 1971-1998. Pada periode 1961-1971 sastra yang berkembang bergaya realistik bahkan sinis ironis dan merupakan ekspresi kehidupan batin atau kejiwaan dengan menggunakan filsafat ekstenialisme. Dan memunculkan corak dengan ide pokok hal-hal keislaman, ide nasionalisme, dan ide rakyat, serta kemanusiaan (Erowati dan Bahtiar, 2011, hlm.17). Kemudian pada periode 1971-1998 ditemukan banyak karya-karya populer dan sastra dengan bentuk eskperimentasi sastra dengan permasalahan yang diangkat berupa permasalahan sosial, pengangguran, kemiskinan, potret miskin dan kaya serta penggunaan cerita dan kepercayaan rakyat pada jenis puisi balada (Erowati dan Bahtiar, 2011, hlm.17). Dapat dikatakan bahwa pada periode 1971-1998, sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan surat kabar dan kajian-kajian mengenai novel di banyak perguruan tinggi. Selain itu kondisi politik dan sosial yang mulai kondusif dan terkendali menjadi faktor lain sastrawan senior maupun pemula untuk memiliki waktu yang lebih banyak untuk menuangkan berbagai ide kreatif.

Pada periode Orde Baru seorang sastrawan memiliki kebebasan dalam bereksprimen dengan berbagai gaya maupun topik dalam karya-karyanya. Kondisi wadah karya sastra berupa majalah sastra yang pada awalnya hanya ada majalah Horison mendorong persaingan di antara pada sastrawan yang ada. Akibat besarnya minat masyarakat pada sastra dan karya sastra mendorong banyak kajian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli. Melihat kondisi tersebut beberapa universitas membuka jurusan sastra untuk melahirkan sarjana sastra

untuk memandu masyarakat memahami sastra dan merangsang lahirnya karya sastra dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan teori-teori dan metode-metode sastra (Erowati dan Bahtiar, 2011, hlm.73). Kehadiran sarjana-sarjana sastra juga diharapkan mampu memberikan kritik terhadap karya-karya sastra Indonesia sehingga karya-karya dari Indonesia mampu bersaing dengan sastra dunia.

Novel Wasripin dan Satinah yang menjadi sumber kajian di dalam tulisan ini sendiri tidak termasuk karya sastra yang terbit pada periode perkembangan sastra 1971-1998. Karena novel tersebut terbit untuk pertama kali pada tahun 2003. Namun jiwa zaman yang terkandung pada karya-karya sastra periode 1971-1998 dapat ditemukan dalam novel tersebut. Hal ini bisa dilihat dari muatan-muatan pada sastra periode 1971-1998 yang identik dengan tema kondisi sosial seperti kesenjangan sosial, pengangguran, maupun kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal berbau klenik dapat ditemukan dalam novel tersebut. Selain itu, Kuntowijoyo yang pada kelahiran sastra periode 1971-1998 sudah cukup dewasa tentu merasakan pengaruh dari perkembangan sastra pada periode tersebut. Seperti tujuan lain dalam terciptanya karya sastra periode 1971-1998 yang menjadi wadah kritik terhadap kondisi sosial negara dalam novel Wasripin dan Satinah juga dapat ditemukan kritik Kuntowijoyo yang disampaikan secara tersirat.

Novel Wasripin dan Satinah yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 oleh Kompas tersebut mengisahkan tentang seorang pemuda yatim piatu yang melakukan perjalanan meninggal kehidupan sebagai pemuas nafsu di sebuah kampung di pinggir sungai di Jakarta. Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan mencari ibu kandung Wasripin tersebut membawanya ke sebuah perkampungan nelayan di Pesisir Utara Jakarta berbekal ijazah SD yang kumal tanpa KTP atau surat keterangan lain. Pada saat di kampung yang dirasa sebagai tempat kelahiran ibunya Wasripin beristirahat dan tertidur di sebuah surau hingga tiga hari yang mendorong kehebohan warga desa dan memberi keyakinan kepada warga bahwa Wasripin merupakan juru selamat yang tengah dinanti oleh warga kampung.

Hal ini mendatangkan berbagai tawaran kepada Wasripin untuk memimpin perkampungan tersebut namun ditolak secara tegas dan Wasripin memilih untuk menjadi petugas keamanan di tempat pelelangan ikan. Wasripin digambarkan sebagai seorang manusia ajaib dimana mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib dan menyembuhkan berbagai penyakit. Kemampuan yang dimilikinya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat sehingga mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat desa. Namun kondisi ini menghadirkan pandangan buruk dari pejabat-pejabat partai yang berkuasa sehingga banyak tuduhan kejahatan yang dilayangkan kepada Wasripin. Dikisahkan Wasripin dituduh sebagai pelaku makar dan diamankan oleh pihak berwenang.

Tokoh lain yang diangkat Kuntowijoyo dalam kisah hidup Wasripin adalah Satinah seorang biduan dangdut keliling di kampung tersebut. Satinah lahir dari keluarga sederhana yang sangat percaya terhadap tahayul. Kondisi ini digambarkan dengan proses pemilihan nama yang disematkan padanya serta pemikiran yang dimiliki keluarganya bahwa nama yang tidak cocok dengan pribadinya akan membawa kesialan terhadap hidupnya serta keluarga yang dimilikinya. Nasib buruk terjadi pada saat Satinah setelah ia lulus SD yakni mendapatkan pelecehan seksual oleh pamannya yang seorang bujak lapuk. Paman Satinah mencoba bertanggung jawab dengan menikahi Satinah namun ditolak oleh orang tua Satinah. Pertanggung jawaban yang diberikan pamannya adalah dengan mencongkel matanya dan mengabdikan hidupnya untuk Satinah. Setelah serangkaian pengalaman kurang menyenangkan yang terjadi di kampung tersebut Satinah dan sang paman pergi dari desa dan berkeliling sebagai penyanyi dan pengiring (Kuntowijoyo, 2013, hlm.50)

Sebagai wanita yang cantik Satinah mendapatkan banyak pinangan yang datang padanya namun ia memilih untuk tidak menerima lamaran tersebut. Pertemuannya dengan Wasripin membuat ia tertarik dengan pria tersebut dan berencana untuk menikah dengannya. Pemikiran untuk menjalin pernikahan yang dimiliki Wasripin dan Satinah datang dari Pak Modin seorang imam surau yang dituakan oleh masyarakat desa tempat Wasripin berkerja sebagai petugas keamanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pak Modin dikenal sebagai sosok yang bersahaja yang taat pada syariat islam. Sebagai tokoh yang dituakan oleh

masyarakat desa, Pak Modin dicalonkan sebagai kepala desa pada suatu pemilihan. Namun pengaruh yang dimiliki Pak Modin dalam masyarakat desa memunculkan kekhawatiran dari Partai Randu. Nasib buruk datang pada Pak Modin yang dijemput paksa oleh pihak keamanan dengan tuduhan makar. Berbeda dengan Wasripin yang kehilangan nyawanya setelah mendapat tuduhan memiliki kaitan dengan organisasi terlarang, Pak Modin dikembalikan namun harus kehilangan kewarasannya (Kuntowijoyo, 2013, hlm.247).

Penulis meyakini bahwa novel Wasripin dan Satinah merupakan gambaran imajinasi Kuntowijoyo yang telah mengendap mengenai Orde Baru adalah ditemukannya beberapa tokoh atau kondisi yang hampir serupa dengan tokoh atau kondisi yang benar-benar terjadi pada periode tersebut. Seperti Presiden Sadarto yang merupakan pemimpin negara dimana cerita berlangsung, atau jumlah peserta pemilu yang hanya diikuti oleh tiga kontestan yakni Partai Randu, Partai Langit, dan Partai Kuda, maupun kondisi masyarakat yang masih lekat dengan hal-hal klenik. Sastra sendiri merupakan seni yang terbentuk dari rangkain kata mengenai kisah seseorang dengan lingkungannya sehingga memiliki kaitan yang erat dengan bahasa dan imajinasi. Bahasa dalam sastra banyak menggunakan simbol-simbol guna merujuk pada sesuatu yang tengah dibicarakan bukan bahasa yang digunakan dalam keseharian. Kondisi tersebut dipilih guna menghindari keributan akibat menyinggung pihak tertentu serta alasan estetika. Hal serupa dilakukan Kuntowijoyo sebagai pencipta kisah Wasripin dan Satinah yang menggunakan permainan kata dalam menggambarkan hal-hal yang benar-benar ada.

Dalam novel Wasripin dan Satinah Kuntowijoyo menghidupkan tokoh orang tua yakni Nabi Hidzir yang memberikan kekuatan dan kesaktian kepada Wasripin secara misterius dan ikut dalam permasalahan politik yang terjadi secara tidak langsung melalui Wasripin (Kusmarwanti, 2015, hlm.149). Sebagai orang Jawa, Kuntowijoyo memberi perhatian tersendiri bagi sosok orang tua dan leluhur. Untuk orang tua yang dimaksud dalam kisah Wasripin adalah leluhur, roh, atau sosok yang dianggap suci atau sosok berusia tua yang memiliki kelebihan. Bukan sebagai sosok yang melahirkan anak-anaknya atau sosok dengan yang membesarkan Wasripin. Sehingga saat Wasripin berbicara bahwa

ia didatangi sosok berumur yang mengajarnya berbagai hal seperti tata cara beribadah, warga kampung nelayan menyimpulkan bahwa Wasripin didatangi Nabi Hidzir dan dipercaya diberikan kelebihan tertentu. Dari landasan tersebut Kuntowijoyo menciptakan tokoh-tokoh imajiner yang mereaksi kondisi lingkungannya secara sederhana namun mengena.

Pemilihan Nabi Hidzir sendiri dilakukan berkenaan dengan sosok Nabi Hidzir yang identik dengan laut. Dalam kepercayaan islam Nabi Hidzir dikisahkan sebagai nabi yang bertemu dengan Nabi Musa setelah Allah menegur Nabi Musa yang menganggap dirinya merupakan makhluk yang paling mulia. Laut sendiri merupakan latar tempat dalam cerita ini sehingga kemuculan Nabi Hidzir yang identik dengan laut menjadi wajar. Selain itu hadir kepercayaan bahwa Nabi Hidzir merupakan sosok misterius yang masih hidup dan apabila seseorang bertemu dengan Nabi Hidzir dianggap memiliki anugera besar serta derajat yang tinggi (Kusmarwanti, 2015, hlm.153). Sehingga saat Wasripin berkata bermimpi diajari tata cara ibadah oleh sosok orang tau, masyarakat di kampung tersebut menyakini bahwa sosok yang ditemui Wasripin adalah Nabi Hidzir. Hal ini menjadi alasan Wasripin mampu menarik simpati dan kepercayaan warga kampung meski baru sebentar menjadi bagian dari wilayah tersebut.

Partai Randu diidentifikasi sebagai Golkar berkenaan dengan sifat-sifat yang ditunjukkan dalam novel Wasripin dan Satinah. Randu merupakan jenis tumbuhan yang memiliki ukuran besar dengan tinggi yang mampu mencapai 8-30 m, dengan batang yang besar. Ciri fisik yang dimiliki oleh pohon randu hampir serupa dengan pohon beringin yang menjadi lambang dari Golkar. Sehingga randu diasosiasikan untuk menyebut Golkar yang menjadi alat politik pada masa Orde Baru. Hal serupa diterapkan untuk mengasosiasikan pesaing Golkar dalam pemilu yakni menyamakan karakter yang dimiliki dua hal berbeda. Dapat dilihat dari pemilihan penamaan Partai Langit untuk merujuk Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki lambang bulan sabit dan bintang yang dipilih berkenaan dengan bulan dan bintang yang merupakan benda-benda langit. Penggunaan kesamaan ciri fisik juga digunakan untuk mengasosiasikan Partai Demokrasi Indonesia yakni dengan mencari kemiripan ciri fisik dalam

logo yang dimiliki partai tersebut. Pengarang memilih Kuda berkenaan dengan logo dari PDI yakni banteng yang merupakan hewan mamalia berkaki empat.

Kemudian kesamaan nada dalam pengucapan cempaka dengan cendana sehingga digunakan untuk merujuk pada nama Jalan Cendana. Jalan Cendana sendiri merupakan tempat yang identik dengan tempat tinggal Presiden Soeharto. Nama Presiden Sadarto yang hampir serupa dengan nama Presiden Soeharto dipercaya sebagai cara Kuntowjiyo menghidupkan Presiden Soeharto ke dalam cerita yang ia bangun. Pemilihan Sadarto sendiri dilakukan berkenaan dengan keinginan Kuntowijoyo untuk memberi ajakan kepada Soeharto untuk sadar. Hal ini dapat dilihat dari cara membaca nama tersebut yang dapat diucapkan sebagai 'sadarto' atau dipenggal menjadi 'sadar to' yang dalam bahasa Jawa dapat diartikan menjadi sadarlah. Kondisi ini hadir sebab Kuntowijoyo sebagai salah satu orang yang hidup pada periode Orde Baru melihat secara sadar mengenai berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada periode tersebut. Selain itu Presiden Soeharto yang digambarkan sebagai presiden yang murah senyum namun tegas pendirian dan tidak segan menyingkirkan saingan politiknya serupa dengan penokohan dari Presiden Sadarto. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Semua anggota kabinet tahu bahwa dia marah besar, meskipun dari luar nampak senyumnya selalu hadir. Lembut dalam penampilan tapi keras dalam perbuatan, kira- kira begitu semboyannya.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.148).

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pemerintah Orde Baru memiliki strategi politik berupa (1) penghancuran PKI, (2) konsolidasi pemerintahan dengan pemurnian Pancasila, (3) penghapusan dualisme kepemimpinan, (4) pengendalian kestabilan politik dan perencanaan pembangunan, (5) pelaksanaan Pemilu 1971, (6) penyederhanaan partai politik, (7) Sidang Umum MPR 1973, (8) serta Penyusunan strategi kabinet pembangunan kedua (Subekti, 2014, hlm.75). Kedelapan strategi tersebut mampu berjalan sesuai rencana dan mendapat hasil yang dapat dibilang memuaskan. Setelah pelaksanaan Pemilu tahun 1971 yang mampu dimenangkan Golkar sebagai partai milik pemerintah, upaya penyederhanaan partai politik

terjadi pada tahun 1973 dengan menggabungkan partai-partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan dan partai berideologi nasionalis dan partai agama non-Islam ke dalam PDI. Sehingga perpolitikan Indonesia dihuni oleh tiga kekuatan yakni Golkar, PPP, dan PDI.

Kondisi politik Indonesia pada periode Orde Baru setelah penyederhanaan partai politik yang terekam dalam novel *Wasripin* dan *Satinah* tidak digambarkan secara rinci mengenai hadirnya pemikiran-pemikiran yang melandasi pemerintah mengambil keputusan penyederhanaan partai politik maupun proses partai-partai tersebut bersatu dalam naungan dua partai baru. Dalam kisah pada novel tersebut hanya ditemukan bahwa politik di negara yang menjadi latar tempat cerita berlangsung terdapat tiga partai politik yang saling bersaing untuk merebut suara dari warga. Jika pada periode Orde Baru secara nyata terdapat dua partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu golongan yakni Golongan Karya, pada novel *Wasripin* dan *Satinah* terdapat tiga partai yakni Partai Randu, Partai Kuda, dan Partai Langit. Pernyataan ini dapat ditemukan pada kutipan berikut.

“Ketua Partai Randu mendekat. ”Wasripin, jangan ditolak kesempatan yang bagus ini. Kau akan kami jadikan koordinator pemenangan pemilu Partai Randu. Kalau menang, kau dapat naik ke tingkat kecamatan. Dari kecamatan dapat meningkat ke kabupaten. Dari kabupaten ke tingkat provinsi. Dari provinsi ke tingkat pusat. Di pusat dunia terbuka: menteri, ketua DPR/MPR, gubernur, bupati. Tinggal pilih.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.31).

“Ketua Partai Langit maju. ”Bagaimana kalau Wakil Ketua Partai Langit?” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.31).

Partai Randu ulang tahun. Partai-partai lain, Partai Kuda dan Partai Langit, meramalkan bahwa kesempatan itu akan digunakan untuk mencuri start alias kampanye terselubung. Mereka gambar-gembor lewat media massa.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.167).

Hanya saja, kampanye terselubung sudah direncanakan sebelumnya oleh ketiga kontestan berupa: ziarah politik, tahlilan politik, doa politik, istighotsah politik, wayangan politik, ruwat politik. Desa menjadi ramai seperti pasar malam dalam minggu itu. Para PKL (Pedagang Kaki Lima) ikut sibuk. Mereka akan pindah dari tempat ke tempat lain, sedikitnya tiga putaran siang-malam.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.80).

Ketiga partai yang dimunculkan di dalam cerita dengan porsi berbeda. Partai Randu yang menjadi gambaran sebagai Golkar mendapat porsi cerita yang paling banyak jika dibandingkan dengan dua partai pesaingnya. Kemunculan Partai Randu bukan hanya muncul dalam upaya menghimpun dukungan dan suara dari masyarakat namun Kuntowijoyo mencoba menggambarkan besarnya kuasa partai tersebut pada setiap lapisan masyarakat. Kemudian kemunculan Partai Langit selalu dikisahkan sebagai saingan yang menempel ketat keberadaan Partai Randu. Sedangkan kemunculan Partai Kuda memiliki porsi yang paling sedikit dan hanya disebut sebagai pesaing Golkar dalam pemilihan. Seperti pada kondisi politik Orde Baru yang nyata, persaingan ketat antara PPP dan Golkar digambarkan dalam kutipan berikut.

“Kabar bahwa Wasripin telah kedatangan Nabi Hidhir itu menular pada semua orang. Begitu cepat, sehingga bukan saja para nelayan tapi juga aparat dan partai-partai. Partai Randu dengar, Partai Langit dengar. Mereka masing-masing mengadakan rapat kilat. Wasripin akan sangat menguntungkan bagi kemenangan partai mereka di perkampungan nelayan itu dalam pemilu yang sudah di ambang pintu. Dan mereka tidak mau kehilangan momentum, mumpung masih hangat beritanya.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.29).

Persaingan yang terjadi antara Partai Randu dan Partai Langit merupakan interpretasi yang telah dipadukan dengan imajinasi Kuntowijoyo dalam melihat kondisi nyata antara Golkar dan PPP. Kampung nelayan yang menjadi latar tempat dari cerita tersebut merupakan wilayah-wilayah yang menjadi target suara dari kedua belah partai. Dalam hal ini kemunculan Partai Kuda yang begitu sedikit berkenaan dengan PDI yang menjadi asosiasi partai tersebut tidak memiliki pengaruh yang begitu besar. Selain karena permasalahan internal partai yang harus bergelut dengan perbedaan kepentingan dan ideologi dari partai-partai berfusi, PDI juga banyak mendapat campur tangan pemerintah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari perolehan suara yang diperoleh ketiga partai pada pemilu-pemilu yang digelar selama Orde Baru. Setelah kebijakan penyederhanaan partai politik secara berturut-turut periode Orde Baru menggelar Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992 dan Pemilu 1997.

Setelah penyederhanaan partai politik (1973) terjadi sebuah peristiwa besar bernama Peristiwa 15 Januari 1974. Peristiwa ini berawal dari kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka pada tanggal 14-17 Januari 1974. Mahasiswa berencana untuk menyambut kedatangannya dengan sebuah demonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma namun dijaga ketat oleh aparat keamanan sehingga mahasiswa memutuskan untuk menerobos masuk. Menurut Jazimah (2013, hlm. 13) kondisi ini terjadi akibat pemikiran mahasiswa yang menentang modal asing dalam hal ini Jepang yang dipilih pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia. Selain itu mahasiswa dan kelompok intelektual merasa tidak nyaman dengan kekuasaan Asisten Presiden yakni Moertopo dan Soedjono yang sangat besar. Panasnya perpolitikan Indonesia pada tahun 1970-an juga menjadi salah satu faktor lain yang mendorong terjadinya peristiwa protes dari mahasiswa tersebut. Dan berbagai protes yang disampaikan diredam secara cepat dengan pendekatan militer. Meski begitu pemerintahan Orde Baru tetap berpijak dengan kuat dan melanjutkan pemerintahan hingga pemilihan berikutnya.

Terjadinya Pemilu tahun 1977 bertujuan untuk memilih anggota legislatif menggunakan sistem yang sama dengan Pemilu 1971 dan mulai menerapkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Untuk proses pelaksanaannya sendiri diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu seperti pada Pemilu 1971. Waktu kampanye pada Pemilu 1977 berlangsung selama 60 hari yang dimulai pada tanggal 24 Februari-24 April 1977 dan diberlakukan minggu tenang hingga pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 (Liddle, 1992, hlm.41). Isu politik yang diusung oleh PDI sebagai gabungan partai nasionalis dan non-islam adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sedangkan PPP sebagai gabungan partai islam mengusung isu agama sebagai alat pemersatu bangsa melalui penekanan makna lambang partai tersebut dan Golkar sebagai satu-satunya golongan karya mengusung isu pembangunan. Dalam kampanyenya Golkar juga mencoba mempertahankan pengalaman Pancasila dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Hasil dari Pemilu 1977 menunjukkan bahwa Golkar mampu meraup kursi sebanyak 232 kursi.

Dengan kemenangan Golkar, pemerintahan kembali dipegang oleh Soeharto dan program yang dijalankan dituangkan dalam Repelita III yang dimulai pada tanggal 1 April 1979 dan berakhir pada 31 Maret 1984 (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm.585). Landasan yang digunakan dalam perancangan dan pelaksanaan Repelita III merupakan landasan pembangunan yang sama dengan landasan yang digunakan Repelita I dan Repelita II. Namun pada Repelita III penekanan yang diberikan pada aspek pemerataan. Bidang-bidang pembangunan baik pangan, sandang, perumahan, kesempatan kerja, pendidikan, izin usaha, maupun keadilan dicanangkan terbangun hingga pelosok Indonesia. Berdasarkan evaluasi dari pemberlakuan Repelita I dan II pemerintah menilai bahwa perlu adanya pendirian industri yang mengolah bahan mentah dan sumber daya alam Indonesia. Sehingga mendorong tercapainya upaya perluasan dan modernisasi produk yang telah ada. Industri yang dibangun berupa industri pupuk dan petrokimia, pulp untuk kebutuhan kertas dan rayon dari bahan kayu hutan, semen dan tekstil, lalu industri peleburan besi terpadu, serta peleburan aluminium.

Kemenangan Golkar juga terjadi pada Pemilu 1982 yang digelar pada 4 Mei 1982 dengan memperoleh suara sebanyak 64,3% dan kursi yang diperoleh sebanyak 242 kursi, disusul PPP dengan perolehan 27,8% dan 94 kursi, kemudian PDI yang memperoleh 7,9% dengan perolehan kursi sebanyak 24 kursi. Pada Pemilu 1982 Golkar mampu mengamankan suara di Jakarta yang menjadi basis kekuatan PPP dan seluruh provinsi kecuali Provinsi Aceh (Miaz, 2012, hlm.99). Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pada peproses Pemilu 1982 diselenggarakan oleh badan penyelenggaran yang mengikutseratakan peserta pemilu dalam proses pengawasan pemilu yang dilaksanakan. Perubahan tersebut dapat terlihat dari ketua Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum yang dipercayakan kepada Menteri Kehakiman dan anggota dari lembaga tersebut yang berasal dari unsur ABRI dan partai politik serta Golongan Karya. Pemerintah mencoba meningkatkan peran partai politik dan Golongan Karya pada proses pemilihan umum yang dilaksanakan. Pada pemilu ini juga lahir suatu lembaga yang memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu yakni Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak

Pemilu) yang diketuai oleh Jaksa Agung RI. Hadirnya Panwaslak Pemilu sendiri berkenaan dengan maraknya kecurangan berupa manipulasi perhitungan suara dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh petugas pada Pemilu 1971 dan Pemilu 1977. Hal ini dilakukan untuk kembali membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Tugas Panwaslak Pemilu adalah pengawasan terhadap jalannya proses pemilihan umum pada anggota DPR, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II di wilayahnya masing-masing (Jukari, 2021, hlm.7). Pengawasan dilakukan dengan menampung aduan atas permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan peserta pemilu. Setelah aduan diterima kemudian dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain itu pada proses Pemilu tahun 1982 pemerintah juga menghadapi kondisi baru yakni golput. Golput atau Golongan Putih sendiri merupakan istilah yang merujuk kepada seseorang yang tidak menggunakan hak suaranya pada proses pemungutan suara pada suatu pemilihan umum. Istilah golput mulai muncul sebelum proses Pemilihan Umum tahun 1971 berlangsung sebagai bentuk protes mahasiswa yang merasa tidak menjumpai tokoh-tokoh politik yang mampu menampung aspirasi mereka. Hal ini semakin marak terjadi dan menjadi salah satu hal yang coba dibenahi oleh pemerintah Orde Baru.

Selain menyelesaikan permasalahan golput, pemerintah Orde Baru juga mencoba kembali menguatkan pondasi guna mempertahankan kemenangan Golkar dengan mengubah struktur pada Badan Penyelenggara Pemilu. Dan melakukan kampanye dengan skala yang besar. Namun sangat disayangkan bahwa kampanye Golkar pada Pemilu 1982 mengalami keributan akibat robohnya panggung yang digunakan untuk menampilkan hiburan selama kampanye. Keributan terjadi pada kampanye akbar tanggal 18 Maret 1982 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ditengah cekcok antara panitia dan peserta kampanye setelah rubuhnya panggung, hadir massa tidak diundang yang berusaha menyerang panggung kampanye dan membakar atribut kampanye Golkar. Kerusakan meluas hingga ke wilayah Gunung Sahari, Jalan Veteran, Gambir, Jalan Senen Raya, Jalan Keramat, dan Cempaka Putih. Pemilu 1982 juga diwarnai dengan aksi kekerasan yang kemudian mengakibatkan dua surat

kabar mendapat larangan terbit karena memberitakan mengenai kerusuhan dalam rapat umum Golkar di Jakarta yang memakan korban sebanyak 60 orang (Elson, 2005, hlm.447).

Kehebohan sekitar pemilu yang mendorong ketegangan di antara para peserta juga digambarkan Kuntowijoyo dalam cerita. Kondisi ini dapat lihat dari kehebohan pada saat robohnya panggung tempat pidato Ketua Partai Randu pada pagi hari sebelum digunakan. Hal ini mendorong Partai Randu dan Partai Langit saling berdebat mengenai pelaku dari insiden tersebut. Meski begitu polisi sebagai pihak yang berwenang untuk menyelidiki kejadian tersebut memberi pernyataan bahwa palakunya merupakan pihak ketiga. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Ceritanya, panggung calon tempat pidato Ketua Partai Randu roboh pagipagi, hanya beberapa jam sebelum dipakai. Panitia geger, tidak mungkin lagi membuat panggung. Pimpinan Partai Randu menuduh Partai Langit yang telah berbuat itu. Partai Langit membantah, menyatakan perlunya dibentuk tim pencari fakta independen. Polisi menyatakan ada pihak ketiga sengaja memperkeruh situasi. Kepala Polisi berjanji akan mencari pihak ketiga itu, artinya ekstrem kiri (PKI), ekstrem kanan (DI/ TII), dan Golput. Rapat di alun-alun dibatalkan, jadi hanya ada rapat tertutup.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.131).

Pada Pemilu 1987 yang digelar tanggal 23 April tahun 1987 pemerintah merubah landasan pemilihan umum dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 yang memberikan jalan yang lebih luas untuk pemerintah lewat militer dan birokrat mengendalikan Pemilu 1987. Hal ini berkenaan dengan penambahan menteri dan panglima ABRI di dalam tubuh Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum. Kemudian pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh kekuatan politik di Indonesia harus menyatakan bahwa dasar ideologinya adalah Pancasila (Effendy, 1998, hlm.120). Kebijakan tersebut menekan PPP sebagai partai dengan ideologi islam untuk kembali menyesuaikan dengan pemerintah lewat perubahan yang telah ditentukan pemerintah. Dalam hal ini PPP harus bertransformasi dari partai berasas Islam atau spiritual menjadi partai berasas Pancasila sehingga terjadi banyak perubahan mulai program-program yang dicanangkan hingga lambang dari partai tersebut. Semula lambang dari partai tersebut adalah Kabah harus berganti menjadi bintang (Sugianti dan Majid, 2021, hlm.9).

Golkar berhasil memperoleh suara sebanyak 73,37% dan 299 kursi dari 400 kursi yang diperebutkan. Faktor yang mendorong Golkar tetap mampu menang adalah pemberlakuan larangan pembentukan cabang partai di bawah tingkat provinsi serta pengurangan masa kampanye yang semula 45 hari menjadi 25 hari. Pemerintah juga turut campur dalam konten-konten yang akan dibicarakan di dalam kampanye yakni adanya pelarangan untuk menjadikan kritik terhadap pemerintah dan program-program yang telah dijalankan, sedang dijalankan, atau akan dijalankan pemerintah sebagai konten kampanye. Sedangkan PPP mengalami penurunan perolehan suara menjadi 16,01% dan 61 kursi akibat pemberlakuan undang-undang yang mendorong perubahan asas PPP. Dan PDI memperoleh suara 10,61% dan 40 kursi (Miaz, 2012, hlm.101). Peningkatan suara yang dialami PDI dipercaya akibat hasil Kongres 1986 yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Soeparjo Rustam. Dalam kongres tersebut mendorong pembentukan DPP PDI yang baru.

Penurunan suara PPP terjadi akibat hadirnya kecurigaan tersendiri kepada PPP sehingga ruang gerak PPP mendapat perhatian lebih oleh pemerintah setelah kerusuhan pada kampanye Golkar menjelang pelaksanaan Pemilu 1982 yang dipantik oleh simpatisan PPP. Selain itu kondisi stabilitas internal PPP juga menjadi faktor lain yang mendorong penurunan suara PPP. NU sebagai basis kekuatan penting PPP memutuskan memisahkan diri dari PPP sehingga PPP harus kehilangan dukungan suara dalam jumlah yang besar (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm.661). Kondisi kurang mengutungkan PPP membawa dampak baik bagi Golkar yang mendapat limpahan suara dari NU. Keuntungan serupa dirasakan oleh PDI yang pada Pemilu 1987 mampu meningkatkan perolehan kursinya menjadi 40 kursi dari sebelumnya memperoleh 24 kursi.

Lalu pada Pemilu 1992 yang dilaksanakan pada 9 Juni 1992 dengan masih menerapkan sistem perwakilan berimbang dan daftar seperti pada pemilu-pemilu Orde Baru sebelumnya. Kemenangan masih berada di tangan Golkar dengan total perolehan suara sebanyak 68,1% dan 282 kursi, disusul PPP dengan perolehan suara sebanyak 17% dan 62 kursi dan PDI yang memperoleh 14,9% dan 56 kursi (Miaz, 2012, hlm.102). Meski menang secara mutlak seperti pemilu sebelumnya namun Golkar mengalami penurunan sebanyak 5,06% dari

perolehan suara pada Pemilu tahun 1987. Hal serupa terjadi pada PPP yang mengalami penurunan meski tetap memiliki tambahan 1 kursi pada pemilihan kali ini namun perolehan suara PPP di beberapa daerah di Sumatera. Berbeda dengan PDI yang mengalami menaikkan perolehan suara dan berhasil menambah 16 kursi pada Pemilu 1992 tersebut.

Penurunan suara Golkar pada Pemilu 1992 terjadi akibat adanya permasalahan dalam internal berupa buruknya komunikasi antara Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat cabang Golkar di beberapa provinsi di Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Utara, dan NTT. Permasalahan lain datang dari aktivis Golkar yang kebanyakan berasal dari purnawirawan ABRI dan perangkat desa yang merasa tidak diberikan keadilan setelah kemenangan besar yang diraih oleh Golkar pada Pemilu 1987. Selain itu Golkar pun memiliki kelemahan dalam mengambil hati kaula muda dan para pemilih baru untuk memberikan suaranya untuk Golkar. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh dua pesaingnya untuk meraih suara dari kelompok masyarakat yang tidak dapat diambil oleh Golkar. Ini terlihat dari mulai berkembangnya pemikiran-pemikiran mengenai pembatasan masa jabatan presiden serta mempertanyakan legalitas pegawai negeri harus menjadi anggota Golkar dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh PPP maupun PDI.

Sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu Orde Baru sebelumnya, pada proses Pemilu 1992 calon-calon anggota DPR/MPR dituntut untuk melakukan penelitian khusus. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan suarat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang (SKTT) (Sugianti dan Majid, 2021, hlm.10). SKTT sendiri dikeluarkan oleh kepolisian setelah para calon anggota DPR menyelesaikan penelitiannya dan mendapat rekomendasi dari Bikoratanas kepada kepolisian. Kebijakan tersebut diambil berkenaan dengan kondisi Indonesia yang mengalami berbagai konflik di masyarakat baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak keamanan. Sebagai contoh adalah kerusuhan yang terjadi pada kampanye Golkar tahun 1982 yang menelan korban tewas dan mendorong penerapan satu asas Pancasila sebagai asas setiap partai yang ada. Partai-partai pesaing Golkar pada pemilihan

yang mulai sedikit berani mempertanyakan kebijakan pemerintah juga menjadi aspek lain yang diwaspadai oleh pemerintah.

Lalu pada Pemilu 1997 digelar pada 29 Mei 1997 dengan penerapan sistem pemilihan yang diterapkan pada pemilu-pemilu Orde Baru sebelumnya. Pada pemilu kali ini Golkar mencapai titik tertinggi perolehan suara dan kursi pemerintahan yakni memperoleh 74,51% suara dan 325 kursi. Sedangkan PPP masih menjadi saingan Golkar dengan posisi yang terus menempel dengan perolehan suara Golkar selama pemilu pada periode Orde Baru. Terbukti dengan perolehan PPP pada Pemilu 1997 yang berada diangka 22,43% dan 89 kursi. Sedangkan PDI mengalami penurunan yang signifikan dengan hanya memperoleh 3,06% suara dan 11 kursi. Kondisi ini terjadi akibat konflik internal PDI akibat dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam tubuh PDI (Perdana, 2021, hlm.34). Pada pemilu tersebut pemerintah memutuskan untuk mengurangi peran ABRI di dalam perpolitikan Indonesia dengan mengurangi jumlah kursi untuk ABRI yang semua 100 kursi menjadi 75 kursi.

Pada pemilu kali ini Golkar harus menghadapi berbagai reaksi negatif yang datang dari masyarakat. Hal ini terjadi akibat masyarakat yang jenuh dengan pemerintahan dan perpolitikan Indonesia yang terus menerus dikuasai oleh Golkar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan lagi menjadi temuan baru dalam tubuh pemerintahan Orde Baru tersebut mendorong keperihatinan masyarakat yang ditunjukkan melalui protes-protes yang datang dari mahasiswa. Selain itu pesaing dalam pemilihan umum pun mulai membicarakan mengenai berbagai langkah yang diambil pemerintah untuk mempertahankan kedudukannya. Kondisi tersebut diperparah dengan masyarakat yang sudah jenuh dengan berbagai kehidupan di bawah pemerintahan Orde Baru. Faktor-faktor tersebut semakin mengeruh hingga menimbulkan gelombang protes secara luas dan dorongan pergantian pemerintahan secara cepat.

Dari hasil-hasil pemilu yang digelar selama periode Orde Baru dapat dilihat bahwa Golkar mendominasi politik Indonesia. Monopoli kekuasaan yang dilakukan pemerintah Orde Baru melalui Golkar dengan pemberlakuan berbagai strategi, kebijakan, dan tekanan kepada partai-partai saingan bukan hanya berpengaruh di perpolitikan namun juga pada aspek birokrasi dan militer.

Sehingga berbagai bentuk usaha pemerintah untuk mempertahankan monopoli kekuasaan didukung secara penuh oleh pihak militer dan birokrasi. Gambaran dominasi Golkar dituangkan Kuntowijoyo dengan kemunculan Partai Randu di hampir sepanjang cerita dengan kekuasaan yang begitu besar hingga disegani oleh pihak-pihak yang berwenang di kampung nelayan tersebut. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut.

“Untuk keperluan Partai Randu, di alun-alun kota didirikanlah sebuah panggung pertunjukkan yang akan diisi rombongan artis-artis dari ibu kota. Dalam rencananya Bupati Kepala Daerah, Komandan Tentara, dan Kepala Polisi akan diminta menyumbangkan suara. Soal perizinan, jangan tanya mudahnya. Partai Randu tinggal menelpon Kepala Polisi. Pengamanan polisi ekstra kuat diperlukan karena Partai Randu memperkirakan yang menonton pasti banyak ekstrem kanan dan golputnya.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.168).

Masing-masing kekuatan tiga peserta politik Orde Baru digambarkan melalui aktivitas Partai Randu, Partai Langit dan Partai Kuda meski kemunculan Partai Kuda di dalam cerita sangat sedikit. Kondisi tersebut terdapat dalam kutipan berikut.

“Intel itu sudah tahu banyak mengenai perkampungan nelayan (umumnya pendukung Partai Langit dan golput, Partai Randu minoritas tapi kuat karena didukung oleh aparat, pegawai negeri, dan sebagian juragan), Pak Modin (dipersangkakan dedengkot Golput), Wasripin (dipersangkakan mendapat ilmu dari Nabi Hidhir, tangan kanan Pak Modin), surau (markas Golput), dan para nelayan (golput).” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.151).

Menurut Machievelli (1997, hlm.32) dalam upaya mempertahankan kedudukan pada sebuah kekuasaan dapat dilakukan dengan segala cara baik hal-hal baik maupun buruk. Pendapat tersebut sangat cocok dengan kondisi pemerintah Orde Baru. Dalam hal ini pemerintah Orde Baru sebagai penguasa mengupayakan kesejahteraan dan pemerataan pemangunan dengan sebaik mungkin namun masyarakat harus mengorbankan eksistensinya dan kebebasannya dalam berpolitik. Sebagai seorang sejarawan yang juga cendekiawan Kuntowijoyo menggambarkan kondisi tersebut dengan upaya Partai Randu untuk mendapatkan Wasripin sebagai kader partai. Hal ini dilakukan berkenaan dengan keinginan partai untuk menguasai suara secara penuh di perkampungan tersebut. Dan penggunaan Wasripin yang telah dianggap salah satu panutan di kampung tersebut menjadi strategi dengan

persentase keberhasilan yang tinggi. Beberapa upaya yang dilakukan dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Sudah pasti Wasripin akan bergabung dengan kelompok surau yang selalu menjadi Golput. Padahal, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Randu sudah menargetkan perolehan suara yang tak mungkin diraih bila surau masih golput. Maka sebagai pemuka masyarakat dan lulusan Pendekar dia mengusulkan dalam rapat LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) untuk memberi saja sebuah KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada Wasripin, tanpa embel-embel ET (Eks Tapol). Syaratnya, dia berjanji tak akan golput. Usulan itu diterima, seperti biasanya dengan aklamasi.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.106).

Strategi Golkar guna menghimpun dukungan suara salah satunya adalah kebijakan monoloyalitas pegawai negeri sipil dimana jumlahnya begitu banyak. Selain itu Golkar yang menyatakan dirinya bukan sebuah partai politik memuluskan jalan Golkar untuk membentuk cabang partai hingga ke tingkat desa dengan memanfaatkan kedudukan birokrasi untuk memobilisasi dukungan dan suara untuk Golkar serta menekan pimpinan di tingkat daerah seperti kepala desa untuk mendorong warganya memberikan dukungan kepada Golkar. Kondisi ini digambarkan dalam kutipan berikut.

“Ceritanya, partai-partai sibuk mempersiapkan diri untuk Pemilu. Partai Randu mengumpulkan para Pendekar Tingkat Desa untuk diangkat jadi Pendekar Tingkat II, syaratnya ialah ia bisa menunjuk orang lain untuk jadi Pendekar, diutamakan calon Pendekar perempuan. Pendekar perkampungan nelayan kita tidak mau ketinggalan. Dia berhasil merekrut anak Pak Kaur Kesra, seorang guru SD, perawan tua berumur 35, untuk jadi Pendekar Tingkat Desa, dia pun naik jadi Pendekar Tingkat II. Pendekar Tingkat II dan Pendekar Tingkat Desa diwajibkan merencanakan strategi (Renstra) pemenangan Pemilu untuk unitnya (desa, pelabuhan, bandara, kantor, stasiun, universitas).” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.111).

Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa pemerintah Orde Baru melihat golput sebagai satu permasalahan yang serius. Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia (2004, hlm.197) menyebutkan bahwa golput dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok. Pertama, golput berdasarkan alasan politik dimana calon pemilih merasa undang-undang mengenai pemilu tidak demokratis dan tidak jujur atau tidak menemukan peserta pemilu yang layak. Kedua, golput yang disebabkan oleh pemikiran bahwa politik dan segala yang berkaitan dengan pemilihan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap

hidup calon pemilih tersebut. Ketiga, golput karena kecelakaan dimana tidak dapat memilih karena tidak memahami aturan yang benar mengenai bagaimana memilih yang benar. Pada periode Orde Baru, kelompok mahasiswa yang memilih golput kerap menggelar kajian mengenai kekuasaan pemerintahan Orde Baru maupun regenerasi kepemimpinan sehingga pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan normalisasi kehidupan kampus yang menjauhkan mahasiswa dari berbagai bentuk diskusi politik (Sulistiyanto, 1994, hlm.9).

Dalam novel Wasripin dan Satinah, Kuntowijoyo menggambarkan tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan Golput pada kutipan berikut.

“Pak Modin dedengkot Golput harus disingkirkan bila partai ingin menang,” kata Renstra yang dibuat Ketua Partai Randu setempat. (Kata “disingkirkan” artinya “dimusnahkan”, “dipenjara” atau “ditahan”). Meskipun renstra itu sudah dicabut pembuatnya baru-baru ini, tapi renstra itu terlanjur menyebar.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.135).

“Sore hari menjelang pertunjukan jalan-jalan yang diperkirakan akan dilalui ekstrem kanan dan Golput dijaga polisi tanpa uniform. Kebetulan surau TPI mengadakan acara Pengajian Akbar. Teratak sudah dipasang, tikar-tikar digelar, ibu-ibu nelayan sudah menyediakan makan, kue, dan kopi.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm. 166)

Selain berpengaruh pada bidang politik dan militer kekuasaan pemerintah Orde Baru juga dapat berpengaruh pada bidang hukum. Kondisi tersebut digambarkan pada narasi mengenai Pak Modin yang menjadi tersangka dalam kasus politisasi agama yang mampu bebas akibat adanya “surat sakti”. Pak Modin yang harus menghadapi hukuman menjadi tahanan desa akibat permasalahan politisasi agama dibantu oleh kawannya yang merupakan seorang legion veteran dengan mengirimkan surat pada istana dan mendapat balasan dari istana berupa pernyataan bahwa Pak Modin tidak bersalah dan bersih dari segala tuduhan. Hal ini menimbulkan banyak gugatan terhadap surat sakti yang membebaskan Pak Modin tersebut. Kegaduhan yang terjadi direspon pihak istana dengan membawa permasalahan tersebut pada sidang kabinet hingga dibuatlah keputusan yang menegaskan bahwa segala bentuk upaya yang mempertanyakan surat sakti berarti mempertanyakan presiden dan akan mendapat sanksi yang berat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Ternyata dengan sepucuk surat itu dunia terbalik. Seminggu kemudian sebuah surat balasan yang ditandatangani tangan Presiden Sadarto datang. Surat itu berisi bahwa Modin sama sekali bersih, dan pihak-pihak yang

telah mencemarkan namanya diminta untuk minta maaf dan merehabilitasi namanya secara terbuka.

Tembusan surat ditujukan kepada-semua instansi tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Tentang cara permintaan maaf dan rehabilitasi tidak ada petunjuk secara spesifik. Instansi-instansi mengadakan rapat intern secara kilat.

Keesokan harinya, semua instansi tingkat kecamatan memasang iklan permintaan maaf, menyatakan Pak Modin bersih, dan berhak memegang jabatan apa saja. Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan tingkat kabupaten datang ke rumahnya. Demikian pula pimpinan kecamatan. (Kuntowijoyo, 2013, hlm.145-146).

“Tentang adanya Surat Sakti yang betul-betul cespleng itu menjadi sorotan pers pusat dan daerah serta kalangan akademisi lokal dan nasional. Pada umumnya, mereka mulai dengan sebuah pengantar yang menegaskan bahwa yang digugat adalah Surat Saktinya, bukan Pak Modin atau Legiun Veteran. Pertanyaan seperti "Milik Siapa Negara?", "Perorangan atau Hukum?", dan "Siapa Berkuasa?" menjadi topik bahasan. Pers makin berani, dan telepon-telepon tidak lagi digubris” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.147).

Kondisi tersebut tentu menjadi sorotan berbagai pihak namun lagi-lagi akibat kekuasaan pemerintahan Presiden Sadarto yang sangat besar mampu menghentikan segala bentuk pembicaraan mengenai surat tersebut dengan pemberlakuan kebijakan yang menekankan bahwa mempertanyakan Surat Sakti sama dengan mempertanyakan presiden dan akan mendapatkan sanksi berupa pemutusan *life line* bagi perorangan serta label terlarang dengan tuduhan ekstrem kanan atau ekstem kiri bagi instansi (Kuntowijoyo, 2013, hlm.147). Dalam pemerintahan Orde Baru kondisi tersebut juga kerap ditemukan pada kasus-kasus yang dirasa menyinggung pemerintah dengan sanksi berupa pemberedelan bagi pers atau media massa maupun label anggota ekterimis bagi perorangan. Meski begitu berbagai diskusi mengenai politik, pemeritahan, dan regenerasi kepemimpinan serta muatan mengenai opini dan penilain pers dan media massa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah masih ditemukan dalam diskusi mahasiswa dan surat kabar yang disajikan dengan bahasa santun, tersirat, dan tidak menyinggung pemerintah.

Pembersihan terhadap PKI dan ketakutan terhadap pemberontakan atas nama agama seperti DI/TII yang terjadi pada pemerintahan Orde Lama, menjadikan Orde Baru lebih ketat dalam mengatur hak berkumpul warga masyarakat. PKI yang sejak awal diyakini sebagai tersangka utama kekacauan

pada awal berdirinya Orde Baru mendorong berbagai tuduhan keterlibatan masyarakat dalam organisasi tersebut yang menimbulkan berbagai diskriminasi bagi pihak-pihak yang dicurigai. Hal ini dapat terjadi akibat pihak pemerintah yang tak lagi mampu menahan diri, adanya penyalahgunaan kekuasaan pihak penguasa hingga adanya budaya sungkan jika berbeda pendapat yang mendorong diskriminasi dalam penegakan hukum (Hafidz dan Nababan, 1998, hlm.7). Setyagama (2015, hlm.26-27) mengemukakan bahwa pihak-pihak yang dituduh terlibat dengan PKI akan diberikan batasan dalam memilih karier dan secara administratif akan diberikan tanda pengenal dengan tanda “ET (Eks-Tapol)” sebagai bukti bahwa orang tersebut merupakan mantan tahanan politik. KTP dan berkas-berkas yang menandakan bersih dari kejahatan menjadi hal yang penting pada periode tersebut. Kondisi ini digambarkan dalam kutipan berikut.

“Maka sebagai pemuka masyarakat dan lulusan Pendekar, dia mengusulkan dalam rapat LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) untuk memberi saja sebuah KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada Wasripin, tanpa embel-embel ET (Eks Tapol). Syaratnya, dia berjanji tak akan Golput.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.106).

“Perahu-perahu nelayan oleng oleh ombak kapal motor itu. Kapal merapat. Seorang awak kapal meloncat ke perahu. Orang-orang di kapal tidak berseragam. Ketika para nelayan tak bergerak, tapi hanya terheran-heran atas kejadian yang belum pernah mereka alami, bedil ditodongkan dari kapal. ”Ayo cepat! KTP atau pecah kepala kalian!” 174 Mereka yang kebetulan membawa KTP segera menunjukkan. KTP-KTP diperiksa. Mereka yang tidak membawa KTP diharuskan naik kapal motor untuk interogasi. Wasripin yang melaut bersama para nelayan ikut naik. Mereka dikembalikan setelah jelas bahwa mereka benar-benar dari kampung nelayan. Kecuali Wasripin yang tidak ber-KTP, bukan penduduk perkampungan nelayan, dan mengaku sebagai Satpam TPI” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.176).

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru untuk menyingkirkan lawan politiknya hal ini dapat dilihat dari tuduhan tanpa dasar dan tanpa melalui proses pengadilan yang diberikan kepada pihak-pihak yang mengganggu ketertiban dan kestabilan politik Orde Baru. Salah satu tuduhan yang bisa memberikan hukuman berat adalah tuduhan makar dan bergabung dengan pihak-pihak yang pernah mencoba mengukudeta pemerintahan di Indonesia

seperti DT/TII, NII, maupun PKI. Dalam novel Wasripin dan Satinah digambarkan dalam kutipan berikut.

”Ini rahasia. Saya dapat bocoran informasi. Penghargaan itu tidak akan diberikan. Pusat yang melarangnya, alasannya macam-macam yang anehlah. Di antaranya, KTP tidak ada. Jadi kau penduduk gelap. Kau dituduh PKI atau DI/TII. Maka saya kira KTP itu perlu segera dibuat. Saya akan mengusahakan secepatnya. Tapi perlu beberapa keterangan. Tanggal lahir?” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.184).

“Pagi TVRI dan koran-koran memberitakan bahwa Wasripin mati ditembak tentara waktu berusaha merebut senjata. Mayatnya dikuburkan di suatu tempat yang dirahasiakan karena dapat menimbulkan syirik. Kemudian juga dikatakan bahwa dia Komandan DI/TII Pantura, anti-Pancasila dan ingin mendirikan Negara Islam dengan kekuatan senjata. Gambar-gambar setumpuk senapan dan seonggok granat tangan di bawah dipan dipajang. Granat yang sama dengan yang digunakan untuk menggranat Candi Gedong Sanga. Kata para pejabat yang dikutip koran ialah bahwa Pemerintah akan menindak tegas pelaku-pelaku makar untuk membuat mereka miris. Perkampungan nelayan itu mengirim orang untuk memborong koran-koran.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.224).

Sebagai tokoh yang mampu menarik simpati dan kepercayaan warga kampung nelayan sehingga membuat Partai Randu menjadi waspada serta menganggap keberadaan keduanya sebagai ancaman tentu keduanya menjadi bulan-bulanan Partai Randu. Upaya-upaya untuk membungkam keduanya telah dilakukan dengan berbagai cara namun tidak kunjung membuahkan hasil hingga tercipta rencana untuk membungkam Pak Modin dengan terlebih dahulu menangkap Wasripin dengan tuduhan sebagai komandan DI/TII Pantura (Kuntowijoyo, 2013, hlm.218). Kemudian menangkap Pak Modin meski tidak diberi hukuman mati namun Pak Modin kembali ke Kampung Nelayan dalam keadaan kurang sehat dimana kehilangan kewarasannya (Kuntowijoyo, 2013, hlm.246-247).

4.3 Kritik terhadap kondisi sosial-politik Indonesia pada tahun 1973-1997 dalam Novel Wasripin dan Satinah.

Kritik sosial terdiri dari dua kata yakni kritik dan sosial. Kritik yang dapat dipahami sebagai tanggapan seseorang terhadap sesuatu yang dibiasanya diuraikan dengan disertai pertimbangan baik dan buruk suatu pernyataan, keadaan, atau hasil karya seseorang. Dalam kritik seseorang harus terbuka

terhadap berbagai pendapat yang saling bertukar baik yang datang dari perasaan pribadi maupun berdasarkan analisis-analisis dan berbagai bentuk pengalaman orang yang memberi kritik (Eagleton, 2003, hlm.70). Saat sebuah kritik dilontarkan harus dilepaskan dari kepentingan, tidak boleh memihak, objektif, serta harus terbuka terhadap pendapat mau pun kritik dari pihak yang lain (Walzer, 1985, hlm.31). Kritik yang harus terbuka dan tidak berpihak bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman serta mengapresiasi sesuatu sehingga mendorong adanya perbaikan dari topik yang dibicarakan jika kritik tersebut diberikan berdasarkan analisis dan evaluasi yang objektif dan masuk akal. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kritik merupakan ungkapan yang dapat berupa uraian berisi analisis dan evaluasi berdasarkan hasil analisis mau pun pengalaman yang diberikan secara objektif dan tidak memihak.

Lalu seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa sosial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu dan saling memberi pengaruh satu sama lain (Abdulsyani, 2012, hlm.30). Interaksi-interaksi yang terjadi baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lambat laun membentuk suatu ikatan tertentu dan pola-pola tertentu yang tidak dapat dilepaskan dari komunitas yang bersangkutan. Dalam suatu masyarakat terdapat ciri, sifat alami, dan peraturannya masing-masing yang membentuk kepribadian yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Sehingga perubahan dan dinamika dalam suatu masyarakat hadir dengan faktor, gaya, dan bentuk yang berbeda. Meski begitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dan dinamika pada suatu masyarakat dapat berasal dari (1) penyebaran informasi; (2) sumber daya yang dimiliki masyarakat; (3) perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan; (4) kebijakan pemerintah; (5) hadirnya individu yang menginginkan kehidupan yang lebih baik.

Dari uraian tersebut kritik sosial dapat dikatakan sebagai aktifitas menilai, membandingkan, dan mengungkapkan mengenai suatu kondisi sosial pada suatu masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut dan dijadikan pedoman (Walzer, 1985, hlm.30). Dalam hal ini sosial didefinisikan kehidupan

yang dijalani dalam suatu masyarakat sebagai sebuah kelompok yang memiliki suatu aturan tertentu. Sesuai dengan pengertian kritik yang berasal dari bahasa Yunani yakni hakim dan menghakimi tersebut awalnya hadir sejalan dengan berkembangnya kecemasan terhadap kesalahan-kesalahan pada suatu karya kesusastreraan. Kemudian berkembang menjadi konsep yang digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Lalu pada tahun 1990-an kritik mulai berkembang sebagai wadah mengekspresikan pandangan yang berbeda, ketidaksetujuan terhadap sesuatu, keinginan melepaskan diri dari hal-hal tertentu, dan menolak suatu hal.

Kehadiran kritik sosial dapat dikatakan sama tuanya dengan kehadiran masyarakat yang dibicarakan. Hal ini terjadi berkenaan dengan kritik sosial merupakan aktifitas yang tidak harus menunggu adanya filosofi atau penemuan tertentu. Kritik sosial sebagai sebuah aktifitas sosial adalah kegiatan seseorang yang membandingkan, mengamati, dan menilai perkembangan yang terjadi pada masyarakat secara cermat mengenai baik buruknya kualitas masyarakat yang bersangkutan. Kritik sosial merupakan hal penting dalam masyarakat yang kehadirannya harus ada berkenaan dengan pemeliharaan sistem sosial yang ada dan dapat dilakukan oleh siapa pun baik masyarakat secara umum maupun seorang sastrawan sebagai bagian dari masyarakat. Sebuah karya kritik sosial dapat digunakan untuk menilai kondisi perubahan dan perkembangan suatu masyarakat secara kritis sehingga perubahan dan perkembangan yang terjadi dapat menjadi pengetahuan berdasarkan nilai-nilai dan praktik yang benar ada di masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kritik sosial merupakan aktifitas menganalisis, menilai, dan mengevaluasi kondisi suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu secara objektif yang dilakukan seseorang maupun kelompok dengan tujuan tertentu. Kritik sosial dapat dipandang sebagai sebuah ungkapan ketidakpuasan mau pun kecemasan terhadap suatu kondisi tertentu akibat perubahan sosial pada suatu masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suatu kritik sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol yang dimiliki masyarakat terhadap jalannya suatu sistem maupun proses yang berlangsung di masyarakat yang bersangkutan.

Sebagai alat kontrol sosial suatu kritik sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong masyarakat untuk menghormati dan menjalankan proses-proses sosial sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok manusia dengan kebiasaan yang berkembang menjadi tradisi dan kemudian membentuk suatu aturan tertentu. Dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia terbesar yang bernaung di suatu wilayah dengan tradisi, kebiasaan, sikap, dan rasa persatuan yang sama (Basrowi, 2008, hlm.38). Interaksi yang terjadi di masyarakat menghadirkan reaksi dari hubungan-hubungan antara penghuni dalam suatu masyarakat yang mendorong suatu perkembangan pada diri pribadi dan masyarakat itu sendiri. Perubahan tersebut dapat terjadi di berbagai aspek seperti nilai sosial, norma, pola-pola perilaku masyarakat yang bersangkutan, lapisan masyarakat, susunan lembaga kemasyarakatan, dan wewenang pada sebuah kekuasaan hingga interaksi sosial dalam masyarakat tersebut (Soekanto, 2006, hlm.301). Perubahan yang ada dapat terjadi dengan kurun waktu yang relatif lama (evolusi) dan waktu yang singkat (revolusi) tergantung kepada faktor yang memicu perubahan tersebut.

Faktor pemicu suatu perubahan sosial dapat dikategorikan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat, terbagi menjadi empat. Pertama, konflik sosial di dalam masyarakat tersebut yang disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, dan kecemburuan sosial. Kedua, pemberontakan atau revolusi yang berupaya untuk mengganti tatanan yang telah ada dalam masyarakat. Ketiga, dinamika penduduk yang berkaitan erat dengan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Keempat, perkembangan teknologi. Lalu faktor eksternal perubahan sosial terbagi menjadi tiga. Pertama, bencana alam berupa gunung meletus, banjir, dan tsunami yang mampu mengubah lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Kedua, peperangan yang dapat memberikan perubahan kondisi sosial dengan waktu yang relatif cepat berkenaan dengan kerusakan yang terjadi sehingga memunculkan ancaman kehilangan tempat dimana masyarakat tersebut berada. Ketiga, pengaruh budaya

lain yang masuk dan lambat laun mengubah budaya-budaya khas yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.

Hadirnya perubahan sosial dalam suatu masyarakat tertentu merupakan sebuah hal yang wajar. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan tersebut merupakan faktor yang begitu dekat dengan masyarakat. Kritik sosial sendiri ada akibat hadirnya faktor perubahan yang dirasa memiliki dampak yang negatif di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kritik sosial merupakan sebuah bentuk komunikasi masyarakat yang terjadi akibat adanya ketidaknyamanan dan kegelisahan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat (Abar, 1997, hlm.). Kritik sosial ini banyak dibuat oleh masyarakat dengan tujuan utama yakni orang-orang yang dianggap memiliki kuasa di dalam masyarakat tersebut. Pemerintah sebagai pemegang kendali pemerintahan tentu menjadi sasaran ditujuannya kritik tersebut. Selain sebagai bentuk komunikasi dari hadirnya ketidaknyamanan terhadap sesuatu, kritik sosial juga dibuat untuk menyampaikan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi yang ada maupun kinerja dari para pemegang kendali dalam pemerintahan.

Bentuk dari sebuah kritik sastra berbeda sesuai dengan zaman dimana kritik tersebut diberikan. Eagleton (1985, hlm.2) menyebutkan bahwa pada abad pencerahan di wilayah Eropa, kritik sosial disampaikan dalam bentuk sastra tertulis. Hal ini berkenaan dengan fungsi sastra pada periode tersebut merupakan alat unjuk harga diri kaum kelas menengah dan media menuangkan tuntutan-tuntutan melawan negara absolut dan masyarakat yang menganut sistem hierarki. Dari interaksi masyarakat kelas menengah yang menggeluti sastra tersebut kemudian mendorong perkembangan pandangan yang dianggap pendapat umum dari masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pada periode romantik, kritik sastra beralih bentuk menjadi puisi yang dianggap sebagai seni yang absolut dan tanggapan yang mendalam mengenai pemahaman kenyataan sosial tertentu. Kemudian pada periode modern biasanya kritik sosial disampaikan dalam bentuk jurnal ilmiah yang didasarkan pada analisis-analisis tertentu.

Karya kritik sosial dapat diekspresikan dengan dua gaya yakni secara terbuka maupun terselubung. Kritik sosial secara terbuka mendorong kritikus untuk melakukan analisis, penilaian, atau evaluasi terhadap suatu masyarakat secara langsung. Sedangkan kritik sosial secara tertutup atau terselubung adalah kritik sosial yang dilakukan dengan menilai, menganalisis, mengkaji, mengevaluasi maupun mengancam keadaan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu secara tersirat. Salah satu media yang digunakan sebagai wadah mewujudkan kritik secara tersirat adalah karya sastra. Karya sastra merupakan tulisan rekaan yang memuat sebuah kisah atau muatan emosi dan ditulis dengan bahasa yang tidak lazim digunakan dalam keseharian. Karya sastra merupakan bentuk seni rangkaian kata yang dipadukan dengan imajinasi pengarang yang memuat pandangan, kegelisahan, serta pemikiran mengenai lingkungannya baik yang memberi pengaruh secara langsung maupun tidak langsung untuk kelangsungan hidupnya. Jenis karya sastra yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah novel.

Menurut Sudjiman (1984, hlm.53) novel merupakan karya sastra yang berbentuk prosa yang menyajikan mengenai serangkaian peristiwa dan latar yang tersusun berdasarkan rekaan pengarang. Novel dengan judul *Wasripin dan Satinah* tersebut mengisahkan tentang hidup seorang kepala keamanan bernama Wasripin dengan latar tempat pantai utara Jawa. Tokoh-tokoh penting lain yang bersinggungan dengan tokoh Wasripin adalah Satinah seorang biduan dangdung keliling, dan Pak Modin yang merupakan imam sirau di kampung tersebut. Ketiga tokoh yang memiliki alur hidup yang berbeda tersebut saling berinteraksi hingga mendorong hadirnya satu permasalahan dengan orang-orang di tempat tersebut. Latar waktu yang digambarkan dalam novel ini adalah suasana Indonesia pada periode Orde Baru yang dapat dilihat dari pergulatan politik yang menyeret tokoh-tokoh penting yang ada serta suasana di masyarakat yang merepresentasikan kondisi masyarakat pada periode Orde Baru.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pemerintahan tersebut berdiri atas desakan masyarakat yang sudah lelah dengan kondisi pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Pada kurun sepuluh tahun pertama berdirinya rezim tersebut, presiden dan pemerintahan mencoba untuk terus

melakukan kolaborasi dan konsolidasi dengan masyarakat. Hingga pemerintah mampu mengembalikan dan memegang kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan negara yang sebelumnya memudar. Pada kurun 10 tahun kedua pemerintahan berlangsung dominasi kekuasaan mulai menguat pada pemerintahan yang ada dibumbui dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin meraja lela. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia akibat pemberlakuan peraturan yang membolehkan adanya kekerasan tanpa penyelidikan mendalam terhadap pihak-pihak yang dirasa mengancam kestabilan negara. Pada kurun 10 tahun ketiga beridinya Orde Baru kondisi semakin semraut. Kehidupan rakyat kecil jauh dari kata sejahtera, utang yang dimiliki negara semakin membesar. Ranah politik pun masih diwarnai dominasi kekuasaan oknum-oknum tertentu meski sudah mulai hadir pihak oposisi yang mencoba membuka peluang demokrasi yang nyata bagi negara.

Kuntowijoyo sebagai seorang sejarawan yang bergelut dengan fakta-fakta sejarah tentu akan memberikan uraian mengenai rekonstruksi suatu peristiwa sejarah dengan baik dan berdasar. Kemudian sebagai seorang sastrawan yang juga bergelut dengan ranah sejarah tentu menghadirkan sebuah karya yang tidak hanya menyajikan rangkaian kisah suatu tokoh dengan imajinasi sedemikian rupa namun karya sebagai buah pandangan dan kegelisahan yang dialaminya terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sebuah karya sastra Indonesia sebagai wadah kritik sosial dapat dikatakan telah ada sejak masa transisi Hindu-Buddha menuju periode Islam dengan ditemukannya Kitab “Darmo Gandul” meski konsep kritik sosial belum umum pada masa itu (Faruk, 1999, hlm.38). Pada masa pertumbuhan sastra modern Indonesia konsep kritik sosial khususnya pada masa Balai Pustaka lebih banyak membicarakan mengenai kritik terhadap adat istiadat dan sistem feodalisme. Berbeda dengan kritik sosial pada sastra angkatan 45 yang lebih banyak menyoroti revolusi dan nasionalisme dan angkatan 66 yang berbicara tentang keadaan sosial politik Indonesia. Kritik mengenai kondisi sosial politik Indonesia oleh sastrawan angkatan 66 sendiri semakin memuncak pada tahun 1990-an (Handayani, Ngalm, dan Sufanti, 2003, hlm.43-44).

Kegelisahan dan pendapat mengenai bagaimana hidup pada era Orde Baru yang dialami oleh Kuntowijoyo dan pemahaman dari berbagai sumber terpercaya tentu sangat menarik apabila dikemas menjadi karya fiksi. Novel Wasripin dan Satinah yang lahir sebagai respon terhadap berbagai persoalan di masyarakat pada periode Orde Baru. Novel tersebut dikemas dengan gaya bahasa sederhana dan apa adanya tanpa menghilangkan nilai-nilai estetikanya. Setelah penulis melakukan analisis dengan bantuan sosiologi sastra di dalam novel tersebut ditemukan bahwa Kuntowijoyo mengungkapkan kritik sosial terhadap aspek moralitas masyarakat dan aspek politik Orde Baru.

4.3.1 Kritik Terhadap Perpolitikan Orde Baru

Orde Baru terkenal dengan pemerintahan yang otoriter dengan gaya paternalistik yang terkenal dengan monopoli kekuasaan yang kental akan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun disamping itu pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun tersebut tidak dapat dikatakan buruk sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya pemerintahan tersebut untuk memperbaiki kondisi yang carut marut pada awal berdirinya rezim tersebut seperti mengembalikan keikutsertaan Indonesia dalam PBB. Keputusan tersebut bukan hanya memberi pengaruh pada aspek perpolitikan luar negeri dan hubungan dengan negara luar Indonesia namun juga pada aspek ekonomi Indonesia. Orde Baru mampu mengangkat kembali Indonesia dari keterpurukan akibat inflasi dengan program-program yang berfokus pada bidang pertanian.

Seperti dibicarakan sebelumnya bahwa sistem politik Orde Baru mengambil sistem Demokrasi yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga disebut Demokrasi Pancasila. Dengan penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sistem perpolitikan Orde Baru disusupi oleh sistem politik oligarki dimana pemerintahan dikuasai oleh sebagian kecil kelompok yang saling terikat baik ikatan keluarga, kekayaan, mau pun kepentingan tertentu. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang mendorong terciptanya demokrasi semu dimana masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam menggunakan suara dan ikut campur dalam pemerintahan dan perpolitikan. Selain berbagai kebijakan dan memanfaatkan

ABRI sebagai penjaga kestabilan politik, pemerintah juga menggunakan Golkar sebagai alat untuk mengamankan suara dalam setiap pemilihan. Politik Indonesia diramu sedemikian rupa sehingga kursi pemerintahan tetap dapat dimonopoli oleh pemerintah Orde Baru dengan cara-cara yang telah dipersiapkan dengan matang.

Dalam novel Wasripin dan Satinah penulis menemukan kritik mengenai kondisi politik dan pemerintahan Orde Baru yang dituangkan dalam tokoh dan penokohan serta alur dari cerita tersebut. Selayaknya Indonesia pada pemerintahan Orde Baru pada wilayah Pantai Utara Jawa yang menjadi latar tempat cerita tersebut juga menerapkan sistem demokrasi. Dengan pemerintahan yang dikepalai oleh presiden dan kampung nelayan di Pantai Utara Jawa sebagai latar cerita dipimpin oleh seolah lurah. Perpolitikan di wilayah tersebut diisi oleh tiga partai politik dengan perannya masing-masing yakni Partai Randu, Partai Langit, dan Partai Kuda yang aktif dalam setiap pemilihan. Ketiga partai tersebut bersaing untuk mencapai posisi tertinggi dalam pemilu-pemilu yang dilakukan dengan upayanya masing-masing. Kehadiran ketiga partai tersebut secara langsung maupun tidak langsung memperngaruhi kisah perjalanan hidup Wasripin, Satinah, dan Pak Modin sebagai tokoh-tokoh penting dalam novel tersebut.

Temuan yang berhasil penulis temukan mengenai kritik Kuntowijoyo terhadap besarnya pengaruh Partai Randu yang diasosiasikan sebagai Golkar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Partai Randu bukan hanya berkuasa dalam politik namun mampu menjadi hal yang begitu disegani oleh aparat kepolisian hingga tentara. Hal tersebut mendorong mulus dan banyak kemudahan yang diperoleh Partai Randu sebagai partai yang menggambarkan Golkar. Kondisi kekuasaan Partai Randu yang besar ini diperlihatkan dalam kutipan berikut.

“Untuk keperluan Partai Randu, di alun-alun kota didirikanlah sebuah panggung pertunjukkan yang akan diisi rombongan artis-artis dari ibu kota. Dalam rencananya Bupati Kepala Daerah, Komandan Tentara, dan Kepala Polisi akan diminta menyumbangkan suara. Soal perizinan, jangan tanya mudahnya. Partai Randu tinggal menelpon Kepala Polisi. Pengamanan polisi ekstra kuat diperlukan karena Partai Randu memperkirakan yang menonton pasti banyak ekstrem kanan dan golputnya.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.168).

Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa Partai Randu memiliki pendukung dan simpatisan dari berbagai lapisan masyarakat baik dari tokoh-tokoh dalam pemerintahan, aparat negara, hingga warga biasa. Upaya pemerintah Orde Baru dalam mempertahankan kemenangan pada setiap pemilu tidak melulu menggunakan tekanan pada beberapa pihak serta kekerasan namun juga menggunakan upaya persuasi dengan memanfaatkan seni musik pada kampanye yang digelarnya seperti yang dilakukan oleh Partai Randu (Kuntowijoyo, 2013, hlm.80). Secara tersirat Kuntowijoyo juga memberi kritik terhadap mudahnya Golkar dalam mencetak kader-kader partai hingga ke pelosok desa berbeda dengan pesaingnya yang tidak memiliki peluang tersebut. Di dalam cerita kader-kader tersebut diberi nama Pendekar (Pendidikan Kader) partai dengan makna-makna tertentu yang merujuk pada kekuasaan. Mudahnya perekrutan kader sendiri digambarkan dalam kutipan berikut.

“Ceritanya, partai-partai sibuk mempersiapkan diri untuk Pemilu. Partai Randu mengumpulkan para Pendekar Tingkat Desa untuk diangkat jadi Pendekar Tingkat II, syaratnya ialah ia bisa menunjuk orang lain untuk jadi Pendekar, diutamakan calon Pendekar perempuan.

Pendekar perkampungan nelayan kita tidak mau ketinggalan. Dia berhasil merekrut anak Pak Kaur Kesra, seorang guru SD, perawan tua berumur 35, untuk jadi Pendekar Tingkat Desa, dia pun naik jadi Pendekar Tingkat II. Pendekar Tingkat II dan Pendekar Tingkat Desa diwajibkan merencanakan strategi (Renstra) pemenangan Pemilu untuk unitnya (desa, pelabuhan, bandara, kantor, stasiun, universitas).” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.111).

Kekuasaan pemerintah Orde Baru diluar ranah politik juga dapat dilihat dalam intervensi pemerintahan terhadap urusan Pers dan media massa. Tercatat bahwa pada periode Orde Baru bahwa segala aspek kehidupan masyarakat termasuk pemberitaan dan pandangan yang dimuat oleh surat kabar dan media informasi lainnya. Menurut Suwirta, Mail dan Tengah (2021, hlm.45-46) pada periode Orde Baru terjadi banyak pembredelan terhadap pers dan surat kabar yang bersikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru di antaranya harian KAMI, Duta Masyarakat, surat Kabar Indonesia Raya, mingguan Mahasiswa Indonesia, surat kabar Al-Bachar, surat kabar Pedoman, Majalah Tempo dan lainnya. Tindakan tersebut ikut disoroti oleh Kuntowijoyo melalui tindakan dari Menteri Penerangan yang melarang surat kabar mengecam Surat Sakti dengan ancaman

Pencabutan Ijin Terbit (Kuntowoyo, 2013, hlm.148). Sikap keras terhadap Pers mau pun masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah juga ditunjukkan dalam kutipan berikut.

“Tentang adanya Surat Sakti yang betul-betul *cespleng* itu menjadi sorotan pers pusat dan daerah serta kalangan akademisi lokal dan nasional. Pada umumnya, mereka mulai dengan sebuah pengantar yang menegaskan bahwa yang digugat adalah Surat Saktinya, bukan Pak Modin atau Legiun Veteran.

Pertanyaan seperti "Milik Siapa Negara?", "Perorangan atau Hukum?", dan "Siapa Berkuasa?" menjadi topik bahasan. Pers makin berani, dan telepon-telepon tidak lagi digubris.

Telepon diam-diam dikhawatirkan akan malah jadi perbincangan terbuka. Kebebasan mimbar juga demikian. Hari ini dihentikan, hari lain diadakan. Keadaan dirasakan akan lepas kendali.

Rupanya empirit abuntut bedhug (perkara kecil menjadi besar). Presiden sendiri membawa soal kritik pers dan kampus pada Surat Sakti itu ke Sidang Kabi-net. Karena menggugat Surat Sakti berarti menggugat Presiden, sehingga dia merasa digoyang-goyang. Padahal, selama ini tak seorang pun berani menggugat.

Kalau yang menggugat perorangan, semua life linenya akan diputus. Kalau lembaga, akan dinyatakan terlarang. Dan orang-orangnya dinyatakan tersangkut ekstrem kanan atau ekstrem kiri.” (Kuntowoyo, 2013, hlm.146-148).

Meski memiliki kuasa yang besar serta peluang untuk menyebarkan kader serta menjaring suara lebih besar dibandingkan dengan pesaingnya, pemerintah Orde Baru tetap menjadikan golput sebagai momok dalam upaya mempertahankan posisinya dalam pemerintahan. Golput sendiri merupakan isu yang mulai hadir pada Pemilu 1971 dan marak terjadi serta menjadi salah satu permasalahan pada Pemilu 1982. Namun penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah cenderung menggunakan kekerasan serta melabeli golput sebagai sebuah kejahatan. Penyelesaian golput yang dianggap meresahkan bagi pemerintah Orde Baru digambarkan pada kutipan berikut.

“Pak Modin dedengkot Golput harus disingkirkan bila partai ingin menang,” kata Renstra yang dibuat Ketua Partai Randu setempat. (Kata ”disingkirkan” artinya ”dimusnahkan”, ”dipenjara” atau ”ditahan”). Meskipun renstra itu sudah dicabut pembuatnya baru-baru ini, tapi renstra itu terlanjur menyebar. (Kuntowoyo, 2013, hlm.135).

Kentalnya praktik patron-klien pada sistem birokrasi Orde Baru yang memposisikan kepentingan atasan sebagai orientasi birokrasi mendorong

masyarakat harus bergelut dengan sistem yang berbelit dan mengeluarkan uang, tenaga, dan waktu yang lebih banyak. Kondisi tersebut berkenaan dengan besarnya kekuasaan atasan dimana presiden dan pihak-pihak yang memegang andil dalam upaya mempertahankan kekuasaan presiden merupakan atasan yang dimaksud. Gambaran kekuasaan atasan dengan status sosial yang lebih tinggi baik sebagai contoh dalam struktur jabatan mampu mengendalikan kehidupan bawahannya tersebut digambarkan Kuntowijoyo pada kisah Kepala Polisi Kabupaten yang dimutasi akibat membebaskan Wasripin dari tuduhan pembunuhan setelah penyelidikan dengan mamakai asas Praduga Tak Bersalah (Kuntowijoyo, 2013, hlm.126-128). Tindakan keras kepada berbagai pihak yang tidak menyukseskan kepentingan atasan juga digambarkan dalam kutipan berikut.

“Seminggu kemudian Kepala Polisi Propinsi menerima surat tembusan tentang pengunduran diri Kepala Polisi Kabupaten. Surat itu sendiri ditujukan kepada Kepala Polisi Nasional dengan alasan ibunya minta dia menungguinya di hari tua, sebab dia anak tunggal.

Akan tetapi, jawaban dari Jakarta sangat mengejutkan: Dia dipecat dari kepolisian karena pembangkangan. Tuntutan hukum akan menyusul. (Tuntutan itu tidak pernah terjadi).

Nelayan-nelayan selamat. Ketika kabar pengunduran diri Kepala Polisi Kabupaten sampai di perkampungan nelayan itu, mereka merasa kehilangan pelindung. Sebuah pertemuan veteran telah memperjelas sebab sebenarnya pengunduran diri itu.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.172).

Dari kutipan-kutipan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Kuntowijoyo secara tersirat memberikan kritik terhadap monopoli politik Orde Baru. Besarnya kuasa pemerintah Orde Baru yang digambarkan dalam kekuasaan Partai Randu selain pada kutipan-kutipan tersebut juga terlihat dari pembatalan Pilkades yang dimenangkan Pak Modin oleh Bupati sehingga dilakukan pemilihan ulang dengan kader Partai Randu sebagai peserta pemilihan, pemilih, dan pemenang dari pemilihan tersebut (Kuntowijoyo, 2013, hlm.92). Jika dicermati kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kondisi Golput dan rendahnya partisipasi warga Kampung nelayan pada proses pemilihan yang diselenggarakan. Hal ini berkenaan dengan pemerintah dan aparat pemangku jabatan yang tidak mencerminkan keinginan rakyat.

4.3.2 Kritik Terhadap Moral

Pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang mempersempit ruang gerak masyarakat selama berlangsungnya Orde Baru bukan hanya menimbulkan banyak pelanggaran terhadap HAM namun juga melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Selama berlangsungnya pemerintahan, Orde Baru mengklaim bahwa pemerintahannya melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen namun dalam praktiknya terjadi banyak pelanggaran terhadap dua dasar tersebut. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kerakyatan. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi dasar moral pemerintah Orde Baru dan ditumbuh kembangkan di dalam masyarakat namun tercatat pada kurun waktu pemerintahan tersebut terjadi banyak permasalahan HAM, menurunnya moralitas masyarakat, sempitnya ruang bermasyarakat dan maraknya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam novel *Wasripin dan Satinah*, Kuntowijoyo mencoba untuk memberi kritik terhadap moral masyarakat pada periode Orde Baru. Seperti yang telah dibicarakan bahwa pada periode tersebut terjadi berbagai pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa. Dalam bukunya Kuntowijoyo menyoroti bahwa pada periode tersebut terjadi pergeseran dimana nilai-nilai dalam perkawinan tidak lagi dianggap luhur dan suci sehingga perbuatan yang berseberangan dengan nilai-nilai tersebut marak dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Kuntowoyoyo menggambarkan hal tersebut dalam hubungan antara Ketua Partai Randu tingkah Kabupaten dengan seorang guru SD yang merupakan salah satu Pendekar (Pendidikan Kader) Partai Randu. Hubungan yang terbentuk dari hubungan kerja berubah dimana keduanya bertugas untuk membuat strategi pemenangan pemilu untuk unitnya menjadi jalinan asmara. Kondisi tersebut digambarkan Kuntowijoyo dalam kutipan berikut.

“Pendekar tak menolak ketika Pendekar Tingkat II melepas kancing blusnya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Setelah semua selesai Pendekar memuji, ”Terima kasih. Umur 40-an ternyata masih thok-cer!” Hotel itu kemudian jadi tempat pertemuan mereka. Ketika Pendekar Tingkat Desa memperlihatkan tandatanda hamil, Pendekar Tingkat II mengusulkan seorang dukun yang bisa menggugurkan. Tapi Pendekar menolak, ”Ini bayi bayiku sendiri! Jangan gelem nangkane, emoh pulute (mau enaknya, tak mau susahnya) (Kuntowijoyo, 2013, hlm.112).

Dari kutipan tersebut diperlihatkan bahwa bukan hanya nilai-nilai pernikahan yang tidak lagi dianggap luhur namun juga keengganan Ketua Partai Randu tingkat Kabupaten untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Ikatan suci pernikahan antara Ketua Partai Randu tingkat Kabupaten dengan isteri dinodai oleh hubungan terlarang. Kondisi ini merupakan ironi dimana Ketua Partai Randu tingkat Kabupaten sebagai pemimpin harusnya dapat memberikan contoh yang baik dengan menjunjung tinggi dan menjalankan norma yang ada. Selain itu dari kutipan tersebut juga dapat dilihat bahwa terjadi pergeseran sikap perempuan dimana semula perempuan terkesan memiliki sifat yang pemalu, menutup diri, dan menjaga jarak dengan laki-laki. Namun kini identitas tersebut memudar yang digambarkan dengan sikap Pendekar yang tak malu untuk menggoda Ketua Partai Randu tingkat Kabupaten yang sebetulnya telah beristeri.

Kuntowijoyo juga menyoroti mengenai persoalan prostitusi dan perkosaan. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa Wasripin dibesarkan oleh seorang wanita penjual ketoprak di sebuah perkampungan kumuh tepi sungai di Jakarta. Kondisi ekonomi yang sulit mendorong Wasripin hanya mendapat pendidikan hingga tingkat SD. Lingkungan hidup Wasripin memiliki kebiasaan kurang sehat dimana emak angkat yang menjadi orang tua tunggalnya memiliki kebiasaan mabuk-mabukan dan suka bermain dengan laki-laki (Kuntowijoyo, 2013, hlm.4). Kondisi sulit yang dirasakan serta tingkat pendidikan yang rendah mendorong ibu angkat Wasripin memperdagangkan Wasripin kepada kenalannya sebagai pekerja seks komersial. Ironi yang coba digambarkan oleh Kuntowijoyo adalah ketidaktahuan Wasripin bahwa rasa bangga atas pujian dari perempuan-perempuan yang dilayaninya merupakan tindakan yang salah. Bagian tersebut digambarkan oleh pengarang pada kutipan berikut.

“Suatu sore emak angkatnya berkata, ”Yu Mijah butuh tenagamu.” Adegan penyekat di dipan pun terjadi. Wasripin menguras tenaganya untuk Yu Mijah. Sementara emak angkatnya dengan enak gantian tidur di dipan Wasripin. Ia menguras tenaganya. Sore yang lain emak angkatnya akan berkata, ”Tumiyem butuh tenagamu,” dan penyekat pun dipasang, tidak disadarinya entah berapa perempuan sudah minta tenaganya. Perempuan-perempuan yang ditemaninya tidur selalu mengacungkan

jempol kepada emak angkatnya dan emak angkatnya dengan bangga akan berkata kepadanya, "Kata semua orang, engkau laki-laki jempol"

Ia senang dengan pujian itu. Ia juga senang karena dapat membalas budi emak angkatnya, sebab, ia lihat para perempuan yang butuh tenaganya selalu mengulurkan sejumlah uang kepada emak angkatnya." (Kuntowijoyo, 2013, hlm.4-5).

Kuntowijoyo mengisahkan bawah dibalik kebanggaan Wasripin sebab mampu membalas budi kepada ibu angkatnya dengan menjadi pemuas napsu kolega ibu angkatnya tersebut namun dalam diri Wasripin sendiri menolak atas pekerjaan yang ia lakukan. Hal ini terlihat dari keputusannya untuk berhenti dan mencari kampung halaman ibu kandungnya. Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Kuntowijoyo sebagai pengarang kisah tersebut menyurakan ketidaksetuannya terhadap praktik prostitusi. Kisah hidup baru yang dijalani Wasripin di Kampung Nelayan Partai Utara Jawa menjadi bukti yang ditunjukkan Kuntowijoyo bahwa ia lebih memilih membangun cerita dimana tokoh Wasripin yang hidup dalam kesalahan diberi kesadaran dan kembali ke jalan yang benar dan memulai hidup yang baru.

Lalu untuk masalah perkosaan ditunjukkan melalui kisah hidup Satinah yang merupakan korban perkosaan sang paman (Kuntowijoyo, 2013, hlm.46). Dari kondisi tersebut bukan hanya menggambarkan buruknya pengendalian diri yang dimiliki oleh paman Satinah namun juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seks yang rendah. Alasan tindakan sang paman melakukan tindakan asusila kepada Satinah adalah karena tersingkapnya kain yang digunakan Satinah sehingga dorongan biologis yang kuat dan lama tidak terpenuhi disalurkan sang paman dengan tindakan perkosaan terhadap keponakannya sendiri. Moralitas dan spritualitas yang mampu menjadi penghalang tindakan-tindakan tidak terpuji ditengah tekanan nafsu tidak terlihat dalam narasi yang digambarkan oleh Kuntowijoyo. Hal ini berkenaan dengan mulai bergesernya nilai-nilai moralitas dan spiritualitas masyarakat pada saat itu.

Selain pergeseran nilai moralitas, spiritual, serta nilai-nilai pernikahan, Kuntowijoyo juga menyoroti mengenai persegeran nilai-nilai Pancasila. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya nilai-nilai Pancasila terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam novel tersebut kritik terhadap nilai-nilai Pancasila selama periode Orde Baru yang penulis berhasil

temukan adalah adanya kritik pelanggaran terhadap nilai keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalasan cerita dimana Pak Modin dijatuhi hukuman anangan atas pelanggaran dalam pemilu tanpa proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada. Kondisi ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Keberhasilan menyetop usul menjadikan KH Rifa'i Pahlawan Nasional membuka jalan lebar-lebar untuk membidik Pak Modin yang menganut Rifa'iyah. Partai Randu menghubungi Badan Pengawas Agama, minta supaya lembaga itu mengusahakan Pak Modin ditahan atau dipenjara dengan alasan apa saja. (Kuntowijoyo, 2013, hlm.137).”

“Hakim Ketua menunjukkan surat, ”Surat sakti ini mengatakan supaya dia ditahan. Karena ternyata dia tak bersalah, solusinya harus kita cari. Tapi jangan khawatir, sudah ada di kepala saya.”

”Sudahlah, kami setuju-setuju saja.” Sidang dimulai lagi untuk mendengarkan putusan hakim. ”Mengingat Menimbang... Memutuskan: Satu, Pak Modin bersalah karena tingkah lakunya mencurigakan. Dua, Menjatuhkan hukuman: nihil. Tiga, Pak Modin dinyatakan sebagai tahanan desa selama enam bulan. Empat, Pak Modin dikenakan wajib lapor ke Makodim setiap dua minggu, hari Senin. Lima, selesai.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.144).

Kondisi tersebut juga dikritik Kuntowijoyo dalam pengalasan cerita mengenai eksekusi Wasripin setelah ia ditangkap oleh prajurit tentara yang tanpa melalui persidangan tertentu dan dalam waktu semalam mendapat hukuman mati (Kuntowijoyo, 2013, 218). Secara garis besar kritik terhadap moralitas yang digambarkan secara tersirat di dalam novel Wasripin dan Satinah oleh Kuntowijoyo yang mampu penulis kemukakan adalah seputar pergeseran nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat gestur-gestur pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi masyarakat dalam memandang sesuatu. Faktor lain adalah fokus pembangunan ekonomi Indonesia dan berbagai aspek lainnya dengan membuka peluang bagi pihak-pihak asing sehingga mendorong terbawanya budaya-budaya luar ke Indonesia.

Kondisi sosial lain yang dikritik oleh Kuntowijoyo dalam novel Wasripin dan Satinah adalah diskriminasi sosial yang marak terjadi pada periode Orde Baru. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa awal berdirinya Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 yang diyakini didalangi oleh PKI. Oleh sebab itu, PKI dijadikan sebagai partai

terlarang dan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan PKI merupakan pihak-pihak yang harus diwaspadai. Salah satu diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru kepada orang-orang yang diyakini sebagai kaitan PKI adalah dengan pemberian identitas dengan keterangan Eks. Tahan Politik (Eks-Tapol).

“Saudara-saudara ini PKI atau bukan?”

”Bukan!” Mendengar kata PKI mereka surut.” (Kuntowijoyo, 2013, hlm.71).

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa PKI bukan hanya menjadi momok pemerintah akibat kekacauan politik yang pernah diperbuatnya namun sudah menjadi momeri buruk bagi masyarakat. Kondisi ini dapat terjadi karena pada awal berdirinya Orde Baru pemerintah melakukan pemberisahan besar-besaran pada segala aspek yang diyakini memiliki kaitan dengan PKI. Sehingga menjadi memori kolektif masyarakat bahwa PKI adalah momok dalam masyarakat.

Kehadiran PKI sebagai pihak jahat dalam kehidupan masyarakat selain dijadikan sebagai alat diskriminasi oleh pemerintah Orde Baru juga dijadikan sebagai alat untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dirasa mengganggu kestabilan kekuasaan pemerintah Orde Baru. Selain PKI, DI/TII dan NII juga menjadi tuduhan yang melatar belakangi seseorang diberikan hukuman. Dalam kisah Wasripin dan Satinah dapat dilihat dari kasus yang menimpa Wasripin dan Pak Modin. Dari uraian-uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kekuatan politik dan pengaruh militer pemerintah Orde Baru mendorong terjadinya kesewenangan dan tindakan pelanggaran HAM dari oknum-oknum pemerintah.